



# **PERKEMBANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II**

**DESA TUAPEJAT,  
KABUPATEN MENTAWAI**



# **PERKEMBANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II**

**DESA TUAPEJAT,  
KABUPATEN MENTAWAI**



**Oleh:**

**SUKO BANDIYONO  
NGADI  
SUDIYONO**



COREMAP-LIPI

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
(COREMAP II – LIPI)  
Jakarta, 2009**



© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP\*

Katalog dalam Terbitan

Perkembangan Pendapatan Masyarakat di Lokasi COREMAP II,  
Desa Tuapejat, Kabupaten Mentawai/Suko Bandiyono, Ngadi,  
Sudiyono – Jakarta: 2010.

xiii + 95 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-40-3

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333.911



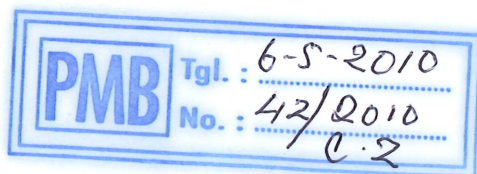
\*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI

Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10  
Jakarta Selatan, 12710

Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720

Telp.: (021) 5207205, 5221687

E-mail: ppk-lipi@rad.net.id





## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2005 dan 2007. Kajian sosial – ekonomi tahun 2005 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2007 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji capaian pelaksanaan COREMAP, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA).

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah

memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi di Desa Tuapejat, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survei. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai, CRITC Kabupaten Mentawai dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009  
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

## RINGKASAN

Pada saat ini puluhan ribu penduduk Mentawai yang tinggal di 34 desa pantai kehidupannya telah tergantung dari hasil penangkapan biota laut pada ekosistem terumbu karang, termasuk masyarakat di daerah penelitian yaitu Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara. Dalam kenyataan kehidupan penduduk lokal yang umumnya hidup dari kegiatan kenelayanan telah mengalami masalah yaitu makin sedikitnya hasil tangkapan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang yang berfungsi antara lain tempat bersarangnya ikan untuk berkembang biak.

Hasil Penelitian Puslit Oseanologi LIPI menunjukkan bahwa hampir sepertiga karang di Indonesia kualitasnya tergolong kurang baik, bahkan untuk wilayah Indonesia Barat (termasuk daerah Mentawai) persentasenya telah mencapai 36,33 persen. Di wilayah Indonesia bagian barat kondisi karang yang tergolong sangat baik hanya 5,4 persen, lebih rendah daripada kondisi nasional sebesar 5,83 persen.

Sebagai respons atas kondisi terumbu karang di Indonesia yang mengalami degradasi, pemerintah Indonesia dengan bantuan dana dari ADB dan Bank Dunia, telah meluncurkan program pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). Dalam program tersebut, kebijakan implementasi telah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, namun dikoordinir secara nasional.

Instansi pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Desentralisasi pengelolaan terumbu karang dilakukan untuk mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pantai. Diharapkan dalam program COREMAP tersebut bahwa

masyarakat pantai dapat melakukan *co-management* secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam program COREMAP versi ADP indikator keberhasilan dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah :

Pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program yaitu tahun 2009. Paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang program COREMAP yang telah dilakukan di Desa Tuapejat pada kurun waktu pertengahan tahun 2005, 2007 sampai Mei 2009. Dengan adanya hasil penelitian empirik ini telah menjadi bahan monitoring dan evaluasi tentang jalannya program tersebut, sehingga merupakan masukan konsep substansi yang perlu diperhatikan secara serius untuk memperbaiki kinerja yang diharapkan akan menimbulkan dampak positif sampai berakhirnya program pada tahun anggaran 2009.

Pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung *top down* tentunya memerlukan persyaratan yang matang dalam proses pengelolaan karena masyarakat telah dianggap sebagai obyek sehingga telah mengabaikan aspek partisipasi masyarakat ( *bottom up*). Dalam kenyataan proses pengelolaan yang datang dari atas yaitu pada tataran kabupaten masih menunjukkan berbagai kelemahan. Beberapa aspek kelemahan yang masih dirasakan antara lain :

- Keterbatasan jumlah SDM yang handal.
- Keterbatasan jumlah SDM ahli untuk melakukan pendampingan
- Pengurus LPSTK lama yang tidak profesional
- LPSTK baru menghadapi kendala pelaksanaan
- LPSTK tidak dapat memanfaatkan Pondok Informasi.

- Praktik pemotasan ikan dan penebangan mangrove masih berlangsung
- DPL yang tidak berhasil

Adapun rekomendasi yang diajukan adalah :

- Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan program.
- Dibutuhkan peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan.
- Perlu proyek percontohan yang terfokus.
- Penyempurnaan Perda sebagai pijakan hukum dalam upaya penyelamatan terumbu karang.
- Sosialisasi program COREMAP masih perlu ditingkatkan.
- Mekanisme penyaluran dana COREMAP perlu diubah.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Metodologi	8
<b>BAB II    PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP</b>	<b>11</b>
2.1. Terbentuknya Pengurus Baru LPSTK	11
2.2. Kegiatan MPA	18
2.2.1. Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan MPA	21
2.2.2. Partisipasi dan Manfaat	51
2.2.3. Permasalahan dan Kendala Sosial	53
2.3. Program Bantuan Fisik Desa	55
2.3.1. Partisipasi dan Manfaat Kegiatan COREMAP	62
2.3.2. Permasalahan dan Kendala Kegiatan Fisik	64
<b>BAB III   PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA</b>	<b>67</b>
3.1. Pendapatan Rumah Tangga	68
3.2. Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan	71
3.3. Pendapatan Anggota Pokmas	74
3.4. Capaian Ekonomi COREMAP	76

<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	85
	4.1. Kesimpulan	85
	4.2. Rekomendasi	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		94



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat Tahun 2005–2009 Kondisi dan Permasalahannya	13
Tabel 2.2 Distrubusi Jenis dan Penggunaan Bantuan yang Diterima	52
Tabel 3.1 Statistik Pendapatan Penduduk per Bulan di Desa Tuapejat, Mentawai tahun 2005, 2007 dan 2009	69
Tabel 3.2 Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan	70
Tabel 3.3 Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Tuapejat, Mentawai	72
Tabel 3.4 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim di Desa Tuapejat, Mentawai	73
Tabel 3.5 Statistik Pendapatan Rumah Tangga Pokmas, Tahun, 2009	75
Tabel 3.6 Distribusi Rumah Tangga Pokmas Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Tuapeujat, Tahun, 2009	76
Tabel 3.7 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden Saat Ini Dibanding Sebelum Ada Coremap	83



## DAFTAR PETA

Peta 1.1.	Peta karang hidup hasil RRI di Tuapejat, Pulau Sipora	2
Peta 1.2.	Lokasi LIT di Sipora	6



# BAB I

## PENDAHULUAN

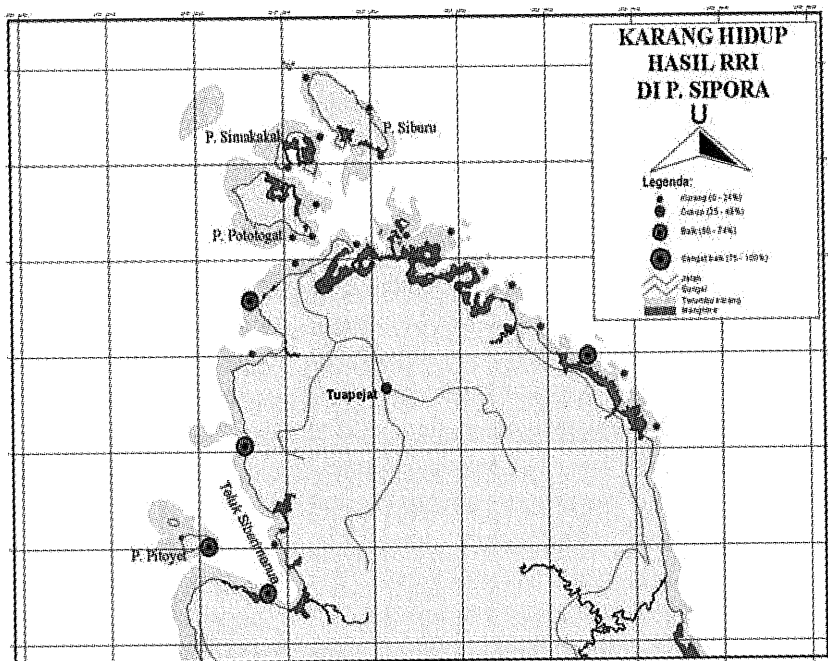
### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Barat sebagai hasil dari UU No.49 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah. Sebelumnya daerah kepulauan Mentawai adalah bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Mentawai merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 4 pulau besar dan 319 pulau kecil, dengan garis pantai lebih dari 750 Km. Hal ini berarti bahwa kepulauan Mentawai seperti halnya Indonesia, mempunyai perairan beserta ekosistemnya, mengandung kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan beraneka ragam, sehingga telah menjadi aset dasar bagi pembangunan. Salah satu dari tiga ekosistem penting daerah pesisir dan sekaligus suatu sistem ekologi laut yang mempunyai sifat kompleks adalah terumbu karang.

Dalam ekosistem terumbu karang diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem tersebut dan telah diidentifikasi lebih dari 93 ribu spesies yang hidup. Komunitas terumbu karang yang saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik telah membuat pesisir sebagai habitat perlindungan, pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut. Ini berarti bahwa dalam ekosistem terumbu karang mempunyai kekayaan plasma nutfah yang sangat besar. Terumbu karang kendati mempunyai sifat yang dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali bila mengalami kerusakan sangat lambat. Oleh karena itu kerusakan pada ekosistem terumbu karang akan berakibat terputusnya hubungan kait-mengkait

antar komponen biotik dan antar komponen abiotik, termasuk tidak berfungsi sebagai pelindung dari ombak dan abrasi laut.<sup>1</sup>

Peta 1.1.  
Peta karang hidup hasil RRI di Tuapejat, Pulau Sipora



Selain terumbu karang yang mempunyai nilai ekologis, terumbu karang dilihat dari kepentingan kehidupan manusia merupakan sumber bahan makanan dan sekaligus sumber bahan obat-obatan dan kosmetik yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini dan masa mendatang. Terumbu karang bahkan dapat meredam pemanasan global yang saat ini telah menjadi masalah dunia. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap hari tanpa disadari penduduk telah memanfaatkan sumberdaya laut dan

<sup>1</sup> Uraian lebih dalam tentang isu terumbu karang dapat dibaca dari buku Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Terumbu Karang. Oleh Panitia Program MAB Indonesia, LIPI. Jakarta: 10-12 Oktober 1995.

ekosistem terumbu karang, antara lain berbagai jenis ikan karang, udang-udangan, dan kerang-kerangan tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga namun telah menjadi komoditi ekspor ke luar negeri (Daliyo dan Suko Bandiyono. 2002: 1). Selain itu kondisi lingkungan laut yang apik bahkan telah menjadi obyek wisata bahari yang banyak dicari oleh wisatawan asing. Perkembangan wisata bahari dengan sendirinya akan memberi pengaruh ganda antara lain pengembangan perhotelan, rumah makan, kerajinan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat ini puluhan ribu penduduk Mentawai yang tinggal di 34 desa pantai kehidupannya telah tergantung dari hasil penangkapan biota laut pada ekosistem terumbu karang, termasuk masyarakat di daerah penelitian yaitu Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara. Desa Tuapejat merupakan satu desa pantai yang terletak paling ujung utara di P. Sipora, tepatnya terletak pada  $2^{\circ} 10' \text{L S} - 2^{\circ} 46,7' \text{LS}$  dan  $99^{\circ} 35' \text{BT} - 99^{\circ} 34,5' \text{BT}$ . Daerah ini seperti halnya daerah lain di kepulauan sebelah barat P. Sumatera mempunyai resiko tinggi kemungkinan terjadinya gempa bumi yang dapat menimbulkan gelombang tsunami, karena kepulauan Mentawai terdapat sesar atau jalur patahan yang memanjang sekitar 600 km dari wilayah laut barat Lampung kearah utara menuju Aceh. Sesar Mentawai tersebut dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh peristiwa gempa 7,9 skala Richter yang terjadi pada tanggal 12 September 2007. Gempa tersebut ternyata telah diikuti puluhan gempa susulan yang telah menimbulkan berbagai kerusakan bangunan di Mentawai, termasuk di Tuapejat.

Pada bulan-bulan Mei-Oktober daerah kepulauan Mentawai keadaan cuaca seringkali tidak bersahabat, karena banyak terjadi badai kencang yang disertai hujan lebat. Kejadian tersebut tentunya sangat mempengaruhi kegiatan nelayan yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan. Pada saat itu angin bertiup dari Samudera Hindia menuju daratan P. Sumatera. Di daerah tersebut curah hujan tahunan sangat tinggi yaitu berkisar antara 2.500-4.700 mm dan temperatur harian juga tinggi. Udara yang panas terutama pada siang

hari antara lain karena lokasi daerah tersebut berada dekat ekuator. Manakala terjadi badai, gelombang laut dapat mencapai tiga meter, sehingga para nelayan tidak ada yang pergi melaut, bahkan kapal motor yang secara rutin menghubungkan antara pelabuhan Muara Batang Arau di Padang dengan pelabuhan Desa Tuapejat tidak berani berlayar. Kondisi laut yang kadang-kadang tidak bersahabat tersebut dengan sendirinya merupakan kendala bagi aktifitas penduduk bahkan telah mempengaruhi proses pembangunan di daerah tersebut.

Desa Tuapejat tersebut terletak di daratan pulau besar Sipora, sebagian merupakan pulau-pulau kecil, yaitu : P. Panjang atau P. Siberu, P. Rimau atau P. Simakakang, P. Hawera, P. Siteut, P. Pitojat Goisok, P. Pitojat Sabeu, dan pulau karang yang lebih dikenal dengan P. Hantu. Para nelayan dan penduduk asli Mentawai mempercayai bahwa di lokasi pulau karang tersebut memang terdapat jin laut. Lokasi daerah penelitian yang mempunyai laut tersebut, sebagian merupakan teluk yang dipinggirnya ditumbuhi dengan hutan mangrove yang kondisinya masih bagus, dengan variasi lebar kurang satu kilometer dari laut. Dengan adanya pulau-pulau tersebut dan hutan mangrove tersebut, maka telah melindungi pantai dari gempuran ombak pada saat musim badai yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan "musim anggau". Masyarakat menyebut musim anggau karena pada saat itu binatang jenis kepiting warna merah yang disebut anggau banyak keluar dari lubang pasir pantai.

Hasil penelitian Tim Ekologi LIPI telah mengukur kerusakan karang di 686 lokasi stasiun di Indonesia. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.



Tabel 1.1.  
Kerusakan Karang Nasional

Wilayah Indonesia	Jumlah lokasi stasiun	Kualitas karang			
		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	278	5,40	24,10	34,17	36,33
Tengah	213	6,10	31,92	45,07	16,30
Timur	195	6,15	21,03	30,77	42,05
Indonesia	686	5,83	25,66	36,59	31,92

Sumber: Suharsono.2005 ( [www.coremap.go.id](http://www.coremap.go.id))

Catatan: Nilai kategori

Sangat baik : 75-100 %

Baik : 50-74,9 %

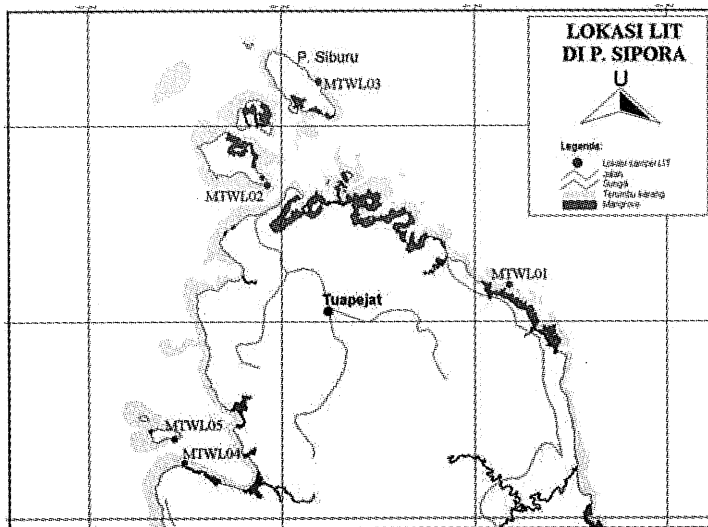
Cukup : 25-49,9 %

Kurang : 0 -24,9 %

Atas dasar hasil penelitian tersebut jelas menunjukkan bahwa hampir sepertiga karang di Indonesia kualitasnya tergolong kurang baik, bahkan untuk wilayah Indonesia Barat (termasuk daerah Mentawai) persentasenya telah mencapai 36,33 persen. Di wilayah Indonesia bagian barat kondisi karang yang tergolong sangat baik hanya 5,4 persen, lebih rendah daripada kondisi nasional sebesar 5,83 persen. Ancaman kerusakan terumbu karang juga dipengaruhi perubahan suhu global yang makin panas, sehingga temperatur air laut dapat naik lebih dari 31 derajat Celcius. Temperatur air laut yang ideal bagi pertumbuhan ekosistem terumbu karang berkisar antara 28-31 derajat Celcius. Khusus untuk daerah Mentawai ancaman kerusakan terumbu karang juga akan dialami sejalan akan terjadinya gempa-tsunami di daerah tersebut, yang waktunya belum dapat dipastikan. Sejarah menunjukkan bahwa akibat pertemuan lempeng samudera Indo-Australia dengan lempeng Benua Eurasia pada tahun 1797 dan 1833 di daerah tersebut pernah terjadi bencana gempa dan tsunami. Pada saat gempa tahun 1833, pusat gempa berada di daerah P.Pagai. Pada saat itu terjadi gempa di atas 9 skala Richter dan menimbulkan tsunami besar (Kompas, 23 Juni 2007).

Sebagai respons atas kondisi terumbu karang, pemerintah Indonesia dengan bantuan dana dari ADB dan Bank Dunia, telah meluncurkan program pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Dalam program tersebut, kebijakan implementasi telah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, namun dikoordinir secara nasional. Instansi pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Desentralisasi pengelolaan terumbu karang dilakukan untuk mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pantai. Diharapkan dalam program COREMAP tersebut bahwa masyarakat pantai dapat melakukan *co-management* secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peta 1.2  
Lokasi LIT di Sipora



Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program COREMAP terutama dilihat dari segi *outcome* dan *impact* yang meliputi aspek biofisik dan aspek sosial-ekonomi. Indikator dari aspek biofisik bahwa program tersebut akan dapat meningkatkan tutupan karang paling tidak 5 persen per tahun, sampai tercapai pada tataran yang sama dengan daerah lain yang telah dikelola dengan baik atau daerah terumbu karang yang masih asli/belum dimanfaatkan ( *pristine area*). Adapun indikator keberhasilan dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah :

Pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program yaitu tahun 2009. Paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Setelah penelitian awal (T0) dilakukan tahun 2005 berbagai kegiatan program COREMAP II di Desa Tuapejat telah dilakukan antara lain kegiatan kelompok nelayan penangkapan ikan, kelompok pembuatan demplot keramba budidaya ikan kerapu, kelompok demplot keramba budidaya kepiting bakau, dan Pokmas pembuatan daerah perlindungan laut (DPL). Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan baik langsung atau tidak langsung akan bermanfaat atau berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apakah memang demikian ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tulisan ini akan mengemukakan hasil evaluasi atas pelaksanaan program COREMAP pada kurun waktu 2005-2009. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data survei 2009 dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya tahun 2005 (t0) dan 2007 ( T1) tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Tuapejat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut.

Sejalan dengan tujuan tersebut dalam tulisan ini secara umum bertujuan untuk mengkaji capaian pelaksanaan COREMAP, khususnya perubahan pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan kegiatan

matapencaharian alternative (MPA). Adapun secara khusus tulisan ini bertujuan :

- Mengkaji jenis kegiatan mata pencaharian alternative (MPA), pembangunan fisik dan permasalahan serta kendala dalam pelaksanaannya
- Menggambarkan perubahan pendapatan

## 1.2. TUJUAN DAN METODOLOGI

Untuk dapat memberi masukan tentang arah yang lebih layak dalam mengimplementasikan program COREMAP II dan untuk memberi masukan tentang kegiatan yang sedang berjalan, maka diperlukan lebih dahulu data empirik aspek sosial-ekonomi dengan melakukan penelitian. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud melakukan monitoring atas pelaksanaan program COREMAP II 2005-2009. Oleh karena itu tujuan khusus penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Tuapejat berkaitan dengan pengelolaan COREMAP, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat, dan perubahan pendapatan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, lebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan beberapa metode: (1) observasi; (2) survei; (3) wawancara mendalam; (4) diskusi kelompok; dan (5) pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dilapangan dilakukan pada akhir minggu pertama hingga pertengahan minggu kedua bulan Mei 2009. Sebelum survei di Desa Tuapejat lebih dahulu tim peneliti mengumpulkan data dan informasi pada instansi terkait pada tataran kabupaten yaitu Dinas DKP dan Yayasan Karekat.

Selanjutnya sebagai langkah awal penelitian tim peneliti melakukan observasi terhadap berbagai obyek yang dianggap relevan yaitu daerah permukiman dan kondisi Desa Tuapejat, alat tangkap, penampungan hasil laut, jenis komoditi di pasar, alat transportasi

/komunikasi dan observasi keadaan lingkungan laut. Daerah yang menjadi obyek observasi tersebut kemudian direkam dengan foto digital. Bersamaan dengan waktu observasi kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan survei aspek sosial-ekonomi rumah tangga penduduk untuk tujuan Benefit Monitoring Evaluation (BME).

Survei dilakukan dengan lebih dahulu menentukan kerangka sampel, yaitu daftar keluarga yang pada tahun 2007 telah menjadi responden. Dalam penelitian ini telah ditetapkan target responden yaitu sebanyak 130 keluarga, dimana 30 keluarga adalah mereka yang menjadi anggota Pokmas Usaha Ekonomi Produktif. Dalam melakukan survei tim peneliti dibantu oleh pewawancara setempat, yaitu beberapa orang warga perempuan. Sebelum mereka melakukan tugasnya terlebih dahulu diadakan pelatihan, guna mengetahui latar belakang penelitian, tujuan penelitian, memahami tata cara wawancara dan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini apabila calon responden telah pindah atau pergi dalam waktu lama maka penghuni rumah tersebut atau tetangga terdekat digunakan sebagai pengganti. Tiap hasil wawancara yang menggunakan instrumen kuesioner, diperiksa oleh tim peneliti. Manakala isian kuesioner dianggap diragukan atau tidak wajar, wawancara ulang dilakukan kembali. Dengan melakukan teknik pengumpulan data tersebut maka dapat diperoleh variasi responden sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut dan responden menyebar.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengerti tentang daerah tersebut dan masalah terumbu karang, antara lain pegawai DKP, pegawai Yayasan Karekat, kepala-kepala Pokmas dan kepala LPSTK. Di samping itu juga diadakan wawancara bebas dengan masyarakat setempat. Dengan melakukan wawancara mendalam telah diperoleh pengetahuan yang meluas tentang daerah tersebut, terutama isu yang terkait dengan implementasi program COREMAP II.

Diskusi kelompok dilakukan satu kali yaitu dengan kelompok nelayan dan sekaligus dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) setempat yang menangani persoalan terumbu karang. Dengan berbagai

teknik wawancara antara lain dapat diperoleh informasi daerah tangkapan ikan, masalah kerusakan lingkungan laut dan pesisir dan informasi tentang kegiatan program COREMAP II.



## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN COREMAP

**P**rogram kegiatan utama COREMAP di Desa Tuapejat menekankan pada dua aspek yaitu penciptaan Matapencaharian Alternatif (MPA) dan kegiatan fisik. Tujuan dilaksanakannya dua program kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga. Harapannya dengan keberhasilan usaha tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem kawasan perairan pantai terutama ekosistem terumbu karang. Uraian berikut ini akan mendeskripsikan tentang pengelolaan program kegiatan dimaksud.

#### 2.1. TERBENTUKNYA KEPENGURUSAN BARU LPSTK

Suksesi kepemimpinan baru LPSTK terjadi pada tahun 2007. Pergantian ini dilalui dengan proses yang panjang dan menegangkan. Proses diawali dengan berkembangnya rumor yang beredar luas di tengah masyarakat tentang adanya penyalahgunaan uang setoran Pokmas oleh Ketua LPSTK. Untuk mengklarifikasi persoalan ini, diadakanlah rapat umum yang dihadiri oleh seluruh Pokmas binaan LPSTK. Dalam forum tersebut, Ketua LPSTK dicecar sejumlah pertanyaan seputar jumlah uang setoran Pokmas yang sudah terkumpul serta keberadaan uang tersebut. Secara administrative Ketua LPSTK tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, bahkan tidak bisa menunjukkan uang tunai yang ada maupun jumlah yang tercatat dalam buku rekening LPSTK. Alih-alih Ketua LPSTK mengakui kesalahannya dan kemudian meminta maaf, yang terjadi malah ganti menuding bahwa yang menggunakan uang setoran Pokmas tersebut adalah Bendahara LPSTK. Sebaliknya Bendahara LPSTK balik menuding kembali kepada Ketua LPSTK. Tuduh menuduh soal penggunaan uang

setoran Pokmas telah memunculkan konflik internal diantara jajaran pengurus LPSTK. Suasana demikian berujung pada lahirnya mosi tidak percaya dari seluruh Pokmas yang ada terhadap kepemimpinan LPSTK.

Melalui musyawarah diantara anggota dan pengurus Pokmas, maka ditunjuklah Mahyudin (Sekretaris Desa) sebagai Ketua LPSTK yang baru. Sebagai Bendahara merangkap Petugas Motifator Desa, ditunjuklah Ibu Nurmaisal Fitri, dan Nardin selaku tokoh masyarakat sebagai Sekretaris LPSTK

Acara serah terima jabatan dari pengurus LPSTK yang lama ke pengurus LPSTK yang baru, dilakukan secara lisan tanpa dibuatkan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengurus LPSTK Desa Tuapejat, dan tanpa diikuti oleh pertanggungjawaban administrasi pengurus lama. Pengangkatan Pengurus LPSTK yang baru secara resmi juga belum dikukuhkan instansi pemerintah yang berwenang. Dalam acara serah terima jabatan kepengurusan LPSTK tersebut, pengurus LPSTK yang baru menegaskan kepada seluruh Pokmas bahwa jajaran pengurus LPSTK yang baru tidak bertanggungjawab atas program-program kegiatan COREMAP tahun sebelumnya.

Salah satu persoalan yang muncul sejak lahirnya program kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat yang tidak pernah terselesaikan adalah soal pengadaan perahu Pokmaswas. Pengurus LPSTK yang lama tidak mau menerima perahu tersebut karena seperangkat kelengkapan berlayar tidak ada, seperti baterai, kompas, jangkar, radio komunikasi HT, senter dan GPS. Demikian juga waktu mau diserahkan mesinnya belum ada, akhirnya perahu dibiarkan terdampar di pantai tanpa perawatan. Saat bantuan mesin tiba, kondisi perahu sudah rusak, lambung pada bocor, akhirnya diserahkan pemakaiannya kepada salah seorang warga desa Tuapejat untuk dioperasikan mencari ikan. Dengan terbentuknya kepengurusan LPSTK yang baru, perahu Pokmaswas tersebut akan diserahkan terimakan kepada pengurus LPSTK, tetapi pengurus yang baru tidak mau menerima, disamping peralatannya yang tidak lengkap, kondisi bodi perahu dan mesin sudah dalam keadaan rusak. Kini perahu tersebut sedang dalam perbaikan, setelah berbulan-bulan



karam dan terjepit olah perahu lain di pantai pelabuhan Tuapejat. Demikian juga mesinnya, kini dalam keadaan rusak berat.

Informasi yang disampaikan oleh seorang mekanik anak buah Pak Nardin (Sekretaris LPSTK), kondisi mesin sudah tidak layak pakai, disarankan lebih baik membeli mesin baru. Hitung-hitungannya jatuhnya lebih mahal memperbaiki daripada beli mesin yang baru. Apakah mesin ini mau diperbaiki atau mau beli mesin yang baru, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara LPSTK dengan pihak PIU. Dana untuk perbaikan sudah diberikan kepada pengurus LPSTK yang lama sebesar 11 juta rupiah, sudah terpakai 4 juta rupiah untuk perbaikan perahu, dan sisanya 7 juta rupiah ada di Pak Nardin selaku Sekretaris LPSTK.

Tabel 2.1.  
Kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat Tahun 2005 – 2009  
Kondisi dan Permasalahan

Lembaga	Th	Kegiatan	Dana (Rp000)	Kondisi	Permasalahan
LPSTK	2005	Merancang dan mengkoordinasikan program kegiatan COREMAP	47.000	Masih jalan	Kualitas SDM rendah, lokasi kegiatan terpencar-pencar, RPTK tidak ada, peralatan kantor tidak ada, proposal dibuat FL, dan uang pendamping dip
Pokmaswas	2008	Pengawasan DPL	12.000	Perahu sedang dalam perbaikan, sudah keluar dana 4 juta	Pengawasan tidak jalan, perahu dan mesin rusak, tanda-tanda DPL hilang
Umbaga	2007	Budidaya kepiting bakau	10.000	Tidak jalan, sudah diputihkan	Tidak menguasai teknik budidaya, dan tidak ada pendampingan
Keret Baga	2007	Penyulingan minyak nilam	?	Tidak jalan, dan sudah diputihkan	Harga jatuh dari 1 juta per kg menjadi Rp 200.000,-

Tubebeusimeru	2007	Budidaya kepiting bakau	10.000	Tidak jalan dan sudah diputihkan	Tidak menguasai teknik budidaya, dan tidak ada pendampingan
Maharani	2008	Pengolahan ikan	11.200	Sebagian belum jalan, sebagian yang lain usaha jualan nasi goreng dan jajanan anak-anak	Kelangkaan bahan baku, harganya mahal, pasar ikan asin terbatas dan murah, sehingga produsen rugi
Sibulatnia	2008	Pengolahan ikan	11.200	Beralih ke warung kelontong, sebagian yang lain ke usaha penangkapan ikan, sudah mengangsur 2 kali	Bahan baku langka dan mahal, nilai jual ikan asin rendah, lebih cepat dan untung dijual dalam bentuk ikan segar
Marakasimeru	2008	Pengolahan ikan	11.200	Beralih ke budidaya ikan air tawar lele dumbo dan nilai	Tidak memperoleh persetujuan dari PIU, tumpang tindih dengan program PEMP, pasar terbatas, dan belum dikuasai teknik budidaya, kegiatan terhenti
Mugalaisimake re	2008	Pengolahan ikan	11.200	Pembuatan krupuk ikan, masih jalan	Bahan baku mahal, pasar terbatas, usaha merugi
Niapeita	2008	Pengolahan ikan	11.200	Beralih penangkapan ikan dan warung kelontong, sudah mengangsur 2 kali	Bahan baku mahal, pasar terbatas, nilai jual ikan asin rendah, dan lebih untung dijual dalam bentuk ikan segar
The Good Family	2008	KJA Ikan kerapi	51.000	Belum jalan, dana sudah diambil 30 juta	Kesulitan mencari papan kayu, tidak ada bibit, tidak ada pendampingan, tidak ada

					koordinasi, bisa mengarah ke konflik keluarga, dan belum dikuasai teknik budidaya
Mandiri Baru	2008	Budidaya rumput laut	14.500	Sudah jalan, produksi tidak maksimal	Mutu bibit jelek, kor.disi lingkungan perairan tidak cocok, terdapat klaim adat atas lokasi tersebut, dan potensi konflik tinggi
Nasironake Patuat	2008	Penangkap an ikan	16.600	Sudah jalan, sudah dioperasikan 5 mesin robin, belum mengangsur	Ikan semakin langka dan jauh
Turonia	2008	Penangkap an ikan	19.200	Sudah jalan, 6 mesin robin sudah dioperasikan	Ikan semakin langka dan jauh
Prsarana fisik	2008	Pengadaan prasarana sosial	?	Pondok Informasi sudah dibangun, MCK dan tambat perahu sudah dibangun	Pondok Informasi tidak berfungsi, MCK hanya 1 pintu yang berfungsi, tambat perahu sudah hancur

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan Implementasi Program Kegiatan COREMAP II Di Desa Tuapejat 8 – 14 Mei 2009.

Tumbangnya kepengurusan LPSTK yang lama, seolah-olah mengesankan bahwa kegagalan program kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat lebih disebabkan oleh lemahnya kinerja jajaran pengurus LPSTK. Fakta ini tidak begitu saja mudah digunakan untuk membungkus atas realitas yang ada. Lemahnya pembinaan kelembagaan juga ditunjukkan oleh lemahnya kinerja Pokmas, yang ditandai oleh rendahnya motivasi usaha Pokmas atau tidak tumbuhnya semangat kewirausahaan, rendahnya komitmen anggota-anggota Pokmas untuk menunaikan kewajiban mengangsur pinjaman dana bergulir. Kredit macet dialami oleh hampir

seluruh Pokmas binaan LPSTK. Tahun 2007 terdapat 4 Pokmas MPA yang mengalami kredit macet, 3 Pokmas sudah diputihkan, dan hanya 1 Pokmas yang masih memiliki kesanggupan untuk mengangsur. Pokmas sebelumnya tahun 2006 seperti "Reureubaga" yang memperoleh bantuan alat tangkap ikan dan mesin, juga mengalami kredit macet dan sudah diputihkan.

Kebijakan memutihkan semua pinjaman yang ditempuh PIU, disadari atau tidak telah memberi andil terhadap menguatnya anggapan bahwa bantuan program COREMAP merupakan uang pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Lemahnya pengawasan dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP, turut pula memberi andil terhadap menguatnya anggapan tersebut. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut juga akan menjadi preseden buruk pada implementasi program kegiatan COREMAP berikutnya.

Cukup beralasan jika bendahara LPSTK ragu terhadap prospek kegiatan COREMAP II. Ia menyatakan bahwa dengan segala kelemahan sumber daya manusia yang ada pada Pokmas, LPSTK, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II, tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi nasib yang sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Indikasi lemahnya kinerja LPSTK ditunjukkan oleh adanya intervensi dari pihak luar terhadap kewenangan LPSTK Lembaga ini juga tidak mampu menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) sebagai pedoman kerja, akibatnya buku tersebut terpaksa dibuatkan oleh pihak luar, dalam hal ini Universitas Bung Hatta. Sebagai buku pedoman, semestinya buku ini tersimpan di kantor LPSTK, ternyata ada di kantor LSM Karekat. Bukan hanya itu saja LPSTK juga tidak mampu membuat usulan-usulan kegiatan dan memverifikasi besarnya anggaran yang diperlukan, akibatnya tugas membuat proposal diserahkan kepada petugas Fasilitator Desa. Dokumen-dokumen menyangkut seluruh kegiatan COREMAP, justru tersimpan lengkap di kantor LSM Karekat, seharusnya yang menyimpan adalah LPSTK. Seluruh kelengkapan alat administrasi seperti mesin ketik, kertas, peta-peta lokasi kegiatan, justru tidak berada di kantor sekretariat LPSTK.

Ditilik dari latar belakang pendidikan formal jajaran pengurus LPSTK, juga menunjukkan kelemahan sumberdaya manusia yang ada. Ketua LPSTK tamat SLA, Sekretaris LPSTK tamat SD, dan bendahara LPSTK tamat SLTP. Dibanding dengan beban kerja LPSTK yang tertuang dalam Tupoksi LPSTK, maka jelas tidak akan mampu memikul beban tugas tersebut. Sisi lain jumlah kegiatan yang banyak dengan lokasi yang terpencar-pencar cukup jauh, terbatasnya jumlah tenaga LPSTK, serta kecilnya insentif yang diberikan kepada para petugas pendamping, tidak membuat mereka bergairah menjalankan tugasnya.

Untuk menunjang kegiatan LPSTK, lembaga ini didanai dari potongan dana bergulir yang diterima Pokmas sebesar 1,86%, ditambah dengan bunga angsuran Pokmas sebesar 0,86%. Dana operasional LPSTK masih ditambah dengan dana pendamping sebesar 47 juta rupiah berasal dari APBD. Sejumlah 26 juta rupiah sudah dipinjam oleh Kepala DKP, yang selanjutnya uang tersebut dipinjamkan kepada seorang petugas Babinsa untuk membuat areal percontohan budidaya keping bakau di km 2. Bagi petugas Motivator Desa (MD), Fasilitator Teknis Desa, dan Fasilitator Non-teknis Desa, masing-masing dipekerjakan sebagai tenaga pendamping dengan sistem kontrak selama 8 bulan oleh LSM Karekat. Sebagai imbalan tugas, seorang petugas Motivator Desa diberi honorarium sebesar Rp 300.000, dan Fasilitator Desa sebesar Rp 2000.000 per bulan.

Khusus bagi tenaga Fasilitator Desa, mereka masih mendapat dana operasional sebesar Rp 500.000 per bulan. Sangat disayangkan bahwa pemberian honor tersebut sering tersendat, contoh honor petugas Motivator Desa tahun 2008 masih menunggak 2 bulan, juga honor petugas Fasilitator Desa, dari bulan April – Mei 2009 baru dibayar Rp 1.000.000. Nasib petugas Fasilitator Desa tahun 2008 malah lebih buruk lagi, karena tersendatnya honor yang diterima, maka untuk sekedar menyambung hidup seorang petugas Fasilitator Desa terpaksa harus berhutang kepada warga masyarakat yang ditumpanginya. Suasana seperti ini jelas sangat tidak kondusif bagi terselenggaranya sebuah gerakan nasional penyelamatan lingkungan melalui program COREMAP.

## 2.2. KEGIATAN MPA

Sumber informasi program kegiatan bidang MPA diambil dari catatan harian Ketua Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) Desa Tuapejat. Terdapat 13 Pokmas tahun 2007/2008, antara lain :

1. **Pokmas Maronsita**, beranggota 8 orang, Ketua Ruslaini, berlokasi di Dusun Mapadegat. Kelompok ini masih berjalan, bidang usaha yang dikembangkan yang tercantum pada usulan kegiatan Pokmas adalah pengolahan ikan. Pokmas ini memiliki pinjaman dana bergulir 15 juta rupiah, sudah mengangsur 2 kali, per bulan Rp 416.000 ditambah bunga 0,86%.
2. **Pokmas Umbaga**, beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Wolter, berusaha di bidang pengembangan budidaya kepiting bakau. Lokasi usahanya di Desa Tuapejat, berada di "Muara Sungai" (lorong-lorong mangrove yang membentuk sungai terutama pada saat musim penghujan), berada di sebelah timur Dermaga Pelabuhan Tuapejat sekitar 20 menit waktu tempuh dengan menggunakan perahu robin. Kelompok ini memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 10 juta rupiah. Belum pernah mengangsur, dan sudah diputihkan (dibebaskan mengembalikan pinjaman dana bergulir karena usahanya tidak berjalan).
3. **Pokmas Tubebeausimeru** beranggota 6 orang, diketuai oleh Salestinus, berusaha di bidang pengembangan budidaya kepiting bakau, besar pinjaman dana bergulir 10 juta rupiah, belum pernah mengangsur, kegiatan ini tidak berjalan, berlokasi di Dusun Jati, dan sudah diputihkan.
4. **Pokmas Keret Baga**, beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Yanfrizal Taziri, lokasi di Dusun Jati, usaha yang dikembangkan penyulingan daun nilam, sudah membangun pondok tempat usaha, sudah memiliki alat-alat perlengkapan penyulingan, tidak berjalan, dan sudah diputihkan.

- 5 **Pokmas Maharani**, beranggota 6 orang, diketuai oleh Ibu Yulimar, bidang usaha yang dikembangkan adalah usaha pengolahan ikan. Kegiatan ini baru berjalan 2 bulan, telah menerima pinjaman dana bergulir sebesar 11,2 juta rupiah, berlokasi di Dusun Kampung dan belum mengangsur.
- 6 **Pokmas Sibulatnia**, beranggotakan 7 orang wanita, diketuai oleh Nurhayati, berlokasi di Dusun Mapadegat, berusaha di bidang pengolahan ikan. Kelompok ini memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 11,2 juta rupiah, dan sudah mengangsur 1 kali.
- 7 **Pokmas Murakasimeruk**, beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Agustina, memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 11,2 juta rupiah. Usaha yang dikembangkan rencananya sesuai yang tertera dalam proposal adalah pengolahan ikan, namun dalam realisasinya berubah ke budi daya ikan air tawar (budi daya lele dumbo), sudah mempersiapkan media kolam tanah, terhenti untuk sementara waktu karena tidak mendapat persetujuan dari PIU.
- 8 **Pokmas Mugalaisimakere**, beranggotakan 7 orang, diketuai oleh Estina, usaha yang dikembangkan adalah pengolahan ikan menjadi kerupuk ikan, sudah berjalan, dan sudah mengangsur 1 kali. Kelompok ini memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 11,2 juta rupiah, sudah mengangsur 1 kali.
- 9 **Pokmas Niapeita**, beranggotakan 7 orang, diketuai oleh Karmi, lokasi kegiatan Dusun Mapadegat, usaha yang dikembangkan pengolahan ikan, sudah berjalan, dengan besar pinjaman dana bergulir yang sudah diterima 11,2 juta rupiah.
- 10 **Pokmas The Good Family**, beranggotakan 5 orang kakak beradik, lokasi kegiatan Dusun Jati, diketuai oleh Novemberudin. Usaha yang dikembangkan budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Kelompok ini memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 51 juta rupiah, sebagian dana tersebut sudah dibelikan bahan material KJA sebesar 31 juta rupiah, sisanya ada

di rekening LPSTK. Usaha ini masih dalam tahap persiapan, media KJA belum juga dibuat.

- 11 **Pokmas Mandiri Baru**, beranggotakan 5 orang diketuai oleh Zaenal Husni atau lazim disebut dengan nama panggilan sehari-harinya Pak Uge. Usaha yang dikembangkan budidaya rumput laut, berlokasi di Dusun Tuapejat, tepatnya berada di muara sungai sebelah Selatan Pelabuhan Tuapejat. Usaha ini sudah berjalan, dengan besar pinjaman dana bergulir 14,5 juta rupiah.
- 12 **Pokmas Nasironake Patuat**, beranggota 5 orang, diketuai oleh Henry, usaha yang dikembangkan berupa penangkapan ikan ramah lingkungan. Lokasi kegiatan berada di Dusun Kampung, memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 16,6 juta rupiah, uang tersebut sudah dibelikan mesin robin 5 buah, masing-masing seharga 3,2 juta rupiah. Usaha ini sudah jalan, tapi belum juga mengangsur pinjaman.
- 13 Terakhir **Pokmas Turonia**, beranggotakan 9 orang, diketuai oleh Asimal, memiliki pinjaman dana bergulir sebesar 19,2 juta rupiah. Uang pinjaman tersebut sudah dibelikan mesin robin 6 buah. Usaha ini sudah berjalan dan sudah mengangsur pinjaman 2 kali.

Masing-masing Pokmas dengan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, lemahnya pendampingan dan pengawasan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat, telah memunculkan persoalan yang spesifik dihadapi oleh masing-masing Pokmas. Sudah barang tentu mengingat keterbatasan waktu, banyaknya program kegiatan dan lokasi yang terpencar-pencar, serta ketiadaan anggota Pokmas maupun jajaran pengurusnya saat dihubungi, membuat tidak semua Pokmas yang ada dapat digali informasinya secara lebih dalam. Berikut adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh team peneliti dalam menggali informasi kegiatan masing-masing Pokmas yang terlibat dalam kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA), Pokmaswas, konservasi Daerah Perlindungan Laut (DPL), dan sekaligus mengungkap berbagai persoalan



yang tengah mereka hadapi. Selain itu, juga akan diuraikan mengenai kegiatan pemberian bantuan prasarana sosial desa, bantuan desa (*Village Grant*), dan pembentukan Lembaga Pengelola Terumbu Karang yang baru. Uraian ini penting guna mendapatkan gambaran yang utuh menyangkut kinerja para pihak yang terlibat dalam program kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat.

### 2.2.1 Jenis Kegiatan dan Proses Pelaksanaan

Berikut ini adalah uraian tentang pelaksanaan kegiatan MPA yang terdiri 7 kegiatan. Informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dengan ketua dan anggota tiap Pokmas.

#### Kelompok Maronsita

Kata maronsita berasal dari bahasa Mentawai yang artinya “Kuat Bersama”. Kelompok ini beranggotakan 6 orang wanita. Jumlah ini lebih sedikit dibanding dengan data yang ada pada catatan Ketua LPSTK sebanyak 8 orang. Latar belakang pekerjaan mereka umumnya adalah petani pekebun. Hanya ibu Ruslaini sendiri selaku Ketua Kelompok yang berlatarbelakang sebagai pedagang. Kelompok ini berkedudukan di Dusun Mapadegat, terletak di sebelah barat kampung induk Desa Tuapejat sekitar 4 km.

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2007. Pembentukan kelompok ini diawali dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Kepala Dusun Mapadegat kepada Ibu Ruslaini, bahwa akan ada program kegiatan COREMAP II berupa bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok nelayan. Mendengar informasi tersebut, Ruslaini merasa tergerak hatinya melihat ibu-ibu rumah tangga petani dan nelayan yang hidupnya serba kekurangan. Terlintas dalam pikirannya apabila ia bisa memanfaatkan bantuan pinjaman dana bergulir, maka akan membuka peluang usaha yang mampu menyerap tenaga kerja, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan.

Didorong oleh kuatnya keinginan menolong nasib sesama kaum perempuan, tanpa berpikir panjang ia mulai mengumpulkan ibu-ibu dari tetangga dekatnya yang dianggap bisa diajak bekerja sama mengelola sebuah usaha pengolahan ikan. Usaha ini merupakan paket kegiatan yang ditawarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai bekerjasama dengan LSM Karekat dan LPSTK kepada kelompok-kelompok nelayan. Ruslaini sendiri sejak semula memang merasa lebih suka membentuk kelompok usaha warung makan dengan mengambil lokasi di pantai pasir putih Mapadegat. Sasaran konsumennya adalah para wisatawan domestik maupun asing yang banyak berkunjung di pantai Mapadegat, terutama pada hari-hari libur. Namun demikian karena paket program kegiatan COREMAP II sudah ditentukan dari atas, maka terpaksa ia terima. Proposal pun kemudian dibuat oleh petugas Fasilitator Desa, atas masukan Pokmas yang sebelumnya sudah dikondisikan oleh petugas Fasilitator Desa tersebut.

Pada bulan November 2008 bantuan pinjaman modal usaha yang dinantikan pun turun sebesar 15 juta rupiah. Kelompok ini mulai mengawali usahanya dengan menerima bantuan seperangkat alat pengolahan ikan meliputi; kompor minyak tanah, dandang, talenan, sendok, ember, baskom, mesin giling daging/ikan, pisau, dan lain-lain. Nilai total peralatan tersebut sebesar 7 juta rupiah. Alat-alat tersebut kini masih disimpan oleh ketua kelompok, tergantung di dinding dapur. Kegiatan yang pertama kali dibuat adalah usaha pembuatan ikan asin. Sebanyak 4 kg dengan harga per kg Rp 15.000. Setelah dikeringkan, bobot ikan tersebut susut menjadi 1,6 kg. Harga jual ikan kering per kg Rp 45.000. Ikan kering hasil usahanya waktu itu laku Rp 60.000 per kg. Pembelinya adalah pegawai pemerintah daerah yang kebetulan mau pulang ke Padang. Menurut hitungannya dengan harga ikan asin Rp 60.000 per kg, baru memperoleh keuntungan sekitar Rp 5000. Dengan harga bahan baku yang sudah mahal dan nilai jual yang rendah sekitar Rp 45.000 per kg, ditambah dengan biaya produksi berupa garam dan curahan tenaga kerja, usaha ini dinilai tidak menguntungkan. Atas dasar pengalaman ini, maka usaha pengeringan ikan asin terpaksa dihentikan untuk sementara waktu.

Usaha pengolahan ikan asin ini kemudian dialihkan menjadi usaha warung makan bakso ikan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kurang lebih 1 bulan, banyak langganan yang menggemari makanan bakso ikan. Hanya sangat disayangkan banyak pelanggan yang makan dengan cara ngebon, yang akan dibayar dikemudian hari kalau sudah punya duit. Banyaknya pelanggan yang ngebon dan enggan membayar bila ditagih, merupakan pertanda buruk bagi kelangsungan usaha yang dirintisnya. Kondisi demikian mendorong Ibu Ruslaini segera mengalihkan usahanya membuka warung kelontong. Latar belakang Ibu Ruslaini sendiri sebagai seorang pedagang kedai warung makan dan warung kelontong sewaktu masih tinggal bersama ke dua orang tuanya di Padang Pariaman, membuat dengan cepat mampu membaca situasi usahanya dan mengalihkan dari usaha yang satu ke usaha yang lain. Naluri kewirausahaannya yang terasah melalui pengalaman masa lalunya, merupakan modal sosial yang membuat kelompok Maronsita masih tetap eksis.

Usaha warung kelontong yang ditekuninya sudah berjalan hampir 3 bulan. Usaha ini dibuka atas dasar kesepakatan seluruh anggota. Pengelolaan usaha warung kelontong dipercayakan kepada ibu Ruslaini. Modal awal usaha ini sekitar 6 juta rupiah, berasal dari sisa usaha sebelumnya. Dengan menempati bilik kamar depan seluas 2,5 m x 3 m, warung ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti, odol, sikat gigi, minyak goreng, super mie, rokok, telur, beras, sarden, aneka makanan jajanan anak-anak, dan berbagai minuman segar.

Hal yang menarik dari kelompok ini adalah bahwa diantara anggota kelompok ada komitmen kuat untuk selalu berbelanja di warung Ruslaini. Omset rata-rata per hari berkisar antara Rp 200.000 Rp 300.000. Dari omset sebesar itu rata-rata keuntungan per hari antara Rp 10.000 - Rp 15.000. Indikasi keuntungan yang lain berupa penambahan barang dagangan, seperti super mie yang semula hanya 0,5 dus kini sudah bisa menjual 1 dus, minuman sprite yang dulunya hanya 0,5 dus, kini sudah bisa menjual 1 dus, minuman aqua ukuran 0,5 liter yang dulunya hanya 0,5 dus, kini sudah menjadi 1 dus.

Semua barang-barang dagangan tersebut semula dibeli dari Pasar Tuapejat yang dibeli seminggu sekali tiap hari Rabu. Kini sudah ada distributor yang menyeter barang ke warung Ruslaini yang datang rutin seminggu sekali. Barang-barang tersebut dibayar secara konsinyasi atau dibayar setelah laku. Karena usaha ini merupakan amanah kelompok, Ruslaini tidak berani menjual barang dengan cara dihutang. Dalam keadaan terpaksa sekali Ruslaini berani menjual barang dagangannya dengan cara dihutang seperti saat-saat ada kematian dan kelahiran yang kebetulan keluarga yang bersangkutan sedang menghadapi kesulitan keuangan. Batas toleransi yang bisa diberikan untuk dihutang hanya pada kisaran Rp 100.000 - Rp 200.000. Kepada setiap pembeli yang mau berhutang selalu ditanamkan pengertian bahwa usaha ini bukan usaha pribadi. Dengan penjelasan ini, umumnya pembeli bisa memahami dan tidak berani lagi memaksakan kehendak untuk berhutang.

Satu hal yang dirasa cukup membanggakan adalah kegigihan usaha kelompok Maronsita, kendatipun usahanya menghadapi banyak saingan, tetapi usahanya masih tetap berjalan lancar. Dibanding dengan usaha sebelumnya, usaha warung kelontong lebih menguntungkan dan lebih ringan tenaganya karena bisa diambil masak dan menjagai anak. Hal lain yang patut dipuji dari kelompok ini adalah kuatnya komitmen diantara anggotanya untuk tetap membayar utangnya. Di tengah rintisan usaha yang jatuh bangun, kelompok ini sudah bisa mengangsur 2 kali. Besar angsuran per bulan Rp 1.200.000 dan bunga sebesar 0,86% per bulan. Lama pinjaman 36 bulan atau 3 tahun. Mereka mengakui bahwa memang belum bisa mengembalikan secara rutin karena keuntungan usahanya belum memungkinkan. Bila dipaksakan akan memakan modal usahanya..

Menurut pengakuan ibu Rusliani, pilihan usaha yang diambil adalah pilihan yang tepat, dan ia merasa bersyukur tidak jadi membangun warung makan di tepi pantai Mapadegat. Dalam perkembangannya pantai Mapadegat kini sudah rusak akibat aktivitas penambangan pasir

dan terkena abrasi air laut. Kerusakan ini telah berdampak pada sepiunya pengunjung.

Untuk mengembangkan usahanya, ia pun tidak banyak berharap pada bimbingan petugas LPSTK maupun Fasilitator Desa. Menejemen keuangan, cukup ia buat secara sederhana dengan membuat catatan belanja barang dan penjualan barang. Suatu pekerjaan yang sudah biasa ia lakukan. Kepada para anggotanya, ia bisa mempertanggungjawabkan usahanya setiap saat anggotanya berbelanja. Buku catatan tersebut selalu tersedia di laci warung ini, dan sewaktu-waktu anggota bisa melihatnya dan mencocokkan barang yang ada. Penambahan barang dagangan sering muncul dari pembicaraan secara informal sebelumnya, antara ibu Rusliani sebagai pengelola dan anggotanya yang secara kebetulan sambil membeli kebutuhan barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Sebagian dari keuntungan usahanya ia simpan, yang sewaktu-waktu bila ada anggota yang membutuhkan bisa dipinjam dari tabungan ini, seperti untuk membayar kebutuhan anak sekolah, membiayai keluarga yang sedang terkena musibah seperti jatuh sakit, dan kematian. Dengan keberadaan warung kelontong ini yang dikelola secara transparan, seluruh anggota Pokmas merasa terbantu. Diakui bahwa usaha ini memang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan yakni pengolahan ikan, tetapi inilah pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan oleh kelompok Maronsita.

## **Kelompok Umbaga**

Kelompok ini dibentuk pada tahun 2007 atas anjuran dari petugas pendamping Fasilitator Teknis Desa dan jajaran pengurus LPSTK. Beranggotakan 5 orang, dipimpin oleh Bapak Wolter. Tempat tinggal anggota kelompok ini berada di Dusun Kampung, Desa Tuapejat. Lokasi budidaya kepiting bakau berada di muara sungai sebelah Selatan pelabuhan Tuapejat, kurang lebih 20 menit jarak tempuh dengan menggunakan perahu robin terutama pada saat angin teduh. Pada saat

gelombang besar, hempasan gelombang dan badai membuat tidak satu pun orang berani berlayar melintasi perairan ini. Muara sungai ini pada saat musim penghujan merupakan tempat limpasan air yang mengalir dari lereng-lereng bukit yang mengitari hutan mangrove. Sementara itu perjalanan dari Dusun Kampung menuju pelabuhan Tuapejat sudah menempuh perjalanan darat yang cukup jauh, kurang lebih 1 km.

Pada tanggal 11 November 2008, kelompok ini memperoleh kucuran dana bergulir sebesar 10 juta rupiah. Setelah dipotong biaya administrasi, potongan untuk dana pendamping LPSTK sebesar 1,86% dari nilai total yang diterima Pokmas, menjadi tinggal 9 juta rupiah. Dana tersebut sudah habis digunakan untuk membangun media kolam budidaya kepiting bakau.

Permasalahan yang dihadapi kelompok ini adalah tidak adanya kekompatan kerja diantara anggota di dalam mencari bibit kepiting bakau, juga dalam memberi pakan dan melakukan pengawasan. Diantara mereka saling mengandalkan satu dengan yang lain. Hubungan sosial yang kurang harmonis diantara anggota, telah membuat kelompok ini terancam bubar. Persoalan lain yang membuat kelompok ini ragu terhadap prospek usaha budidaya adalah tidak dikuasainya teknik budidaya kepiting bakau. Usaha ini sama sekali belum pernah dilihatnya, apa lagi dilakukannya. Demikian juga sifat dan karakter kepiting bakau tidak dipahaminya. Kurangnya pemberian pakan, pencampuran kepiting dari berbagai ukuran dalam satu kolam, membuat kepiting saling memangsa satu dengan yang lain. Datangnya air pasang dan gelombang laut yang kuat telah membuat sebagian kepiting lepas dari keramba, dan sebagian yang masih tersisa habis dicuri.

Kegagalan usaha ini membuat Wolter selaku ketua Pokmas merasa kecewa, kesal, dan lelah bercampur menjadi satu. Ia mengibaratkan kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat bagai ayam kehilangan induknya. Setelah kelompok terbentuk, dana bisa disalurkan, dan kegiatan fisik telah dilakukan, sesudahnya tidak ada satu pun pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pendampingan dan bimbingan. Akibatnya program-program kegiatan COREMAP II hancur

berantakan seperti yang dialami oleh kelompoknya. Nasib yang sama dialami oleh Pokmas budidaya kepiting bakau Tubusimeruk di Dusun Jati.

Kegagalan demi kegagalan, telah membuat pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dihadapkan pada persoalan bagaimana mencari solusi yang tepat untuk menunjang program kegiatan COREMAP II. Pada saat yang hampir bersamaan, salah seorang anggota Babinsa Serma Hermawan sedang berupaya mencari tambahan pendapatan di luar gaji tetapnya sebagai seorang anggota TNI. Pekerjaannya ini telah memungkinkan ia menjalin relasi dengan banyak orang di sekitar Pelabuhan Tuapejat. Hari-harinya ia habiskan bergumul dengan anggota-anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM), orang-orang dari Dinas Perhubungan, dan para pedagang ikan di Tuapejat. Ia pun kenal baik dengan Ketua Pokmas The Good Family, Novemberudin yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pelabuhan. Kepada orang tersebut, Sersan Hermawan menyampaikan keinginannya. Novemberudin balik bertanya kepada Sersan Hermawan, pengalaman usaha apa yang pernah dilakukan selama ini ? Dengan terus terang Sersan Hermawan menyampaikan pengalaman usahanya sebelum ia menjadi anggota TNI di Pematang Siantar Sumatera Utara tempat kelahirannya sebagai nelayan pembudidaya udang lobster dan kepiting bakau. Melihat potensi sumberdaya laut yang tersedia di perairan Tuapejat, ia merasa tertantang untuk mengembangkan usaha budidaya kepiting bakau dan udang lobster. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, ia dihadapkan dengan permasalahan keterbatasan modal

Keinginan Sersan Hermawan ini oleh Novemberudin kemudian disampaikan kepada seorang pejabat Kepala Bidang Balai Benih Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Hatchery Sikapak. Melalui seorang pejabat tersebut keinginan Sersan Hermawan disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tampaknya keinginan Sersan Hermawan bagai

gayung bersambut dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Untuk menindaklanjuti keinginan tersebut, kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mendekati jajaran kepengurusan LPSTK Tuapejat, dengan maksud meminjam dana pendamping sebesar 26 juta rupiah, dari total dana pendamping LPSTK sebesar 47 juta rupiah. Karena yang meminjam adalah pejabat DKP sendiri, maka jajaran pengurus LPSTK tidak berani menolaknya. Uang dana pendamping LPSTK tersebut sebenarnya oleh masyarakat sudah direncanakan untuk membangun warung koperasi nelayan. Dengan dipinjamkannya dana pendamping LPSTK sebesar itu membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk sementara waktu sambil menunggu dikembalikannya pinjaman tersebut.

Berbekal uang pinjaman tersebut, Sersan Hermawan segera merealisasikan kegiatannya. Dengan meminta izin terlebih dahulu kepada salah seorang pemilik lahan, ia membuka sebagian lahan pekarangan dan sebagian lahan yang masih ditumbuhi tanaman mangrove di km 2. Ia mempekerjakan 3 orang anak buah yang dibawa dari Pematang Siantar. Sejumlah 5 petak kolam sudah disiapkan. Petak kolam berukuran 15 m x 20m pada bagian tengah sudah diisi dengan 600 bibit kepiting bakau yang didatangkan dari Siberut. Saat ditebar bobotnya baru mencapai kisaran 2 ons – 2,5 ons. Harga bibit per ekor Rp 3000. Kepiting tersebut kini sudah berusia 2 bulan, bobotnya sudah mencapai antara 6 ons – 8 ons. Budidaya ternak kepiting bakau ini baru bisa dipanen setelah usia 4 bulan. Sebagian dari kepiting tersebut kini sudah ada yang belajar bertelur. Tingkat kematiannya berkisar antara 10% - 15%. Diperkirakan pada usia 4 bulan bobot kepiting akan mencapai antara 9 ons – 12 ons. Harga kepiting sebesar itu di pasaran ekspor negara Jepang, Singapura, Korea, dan Amerika Serikat mencapai Rp 125000 - Rp 150.000.

Kunci keberhasilan budidaya kepiting bakau terletak pada : Pertama sirkulasi air yang bagus; Ke dua ruang gerak yang cukup menyesuaikan dengan ruang habitat kepiting seperti pembuatan pulau-



pulau kecil yang menyembul di tengah kolam, sehingga kepiting bisa lari di tempat itu untuk menghindari kejaran lawannya, dan ke tiga pakan yang cukup berupa ikan-ikan rucah seperti limbah ikan dan ikan-ikan kecil tamban yang mudah didapat di sekitar perairan Tuaepejat.

Uniknya untuk mengembangkan budidaya kepiting bakau ada kepercayaan yang dipantangkan yakni tidak boleh diambil satu pun kepiting yang ada di kolam untuk dikonsumsi sebelum dipanen. Resikonya bila pantangan ini dilanggar semua kepiting di kolam akan mati. Pantangan ini dipatuhi betul, sebab sudah berulang kali ia buktikan pada masa lalu ketika masih berada di Pematang Siantar. Hermawan sendiri juga percaya bahwa tempat usaha ini ada "penunggu makhluk halus (jin). Agar Si penunggu tersebut tidak mengganggu kerjanya, penunggu tersebut sudah ditempatkan di salah satu sudut bidang lahan yang sedang digarap. Pantangan yang lain yang harus dipatuhi oleh siapa pun yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah, tidak boleh bekerja sambil merokok, minum, atau pun makan. Kalau sedang bekerja ya harus bekerja secara serius, tetapi kalau mau istirahat, ya istirahat saja sepenuhnya, dan baru ketika tenaga sudah pulih kembali, segera melakukan pekerjaan.

Selain kolam yang sudah berisi kepiting bakau, terdapat satu bentang kolam besar berukuran 25 m x 25 m sudah berisi air, sudah ditaburi kapur penawar hama, dan sudah siap tebar benur. Kolam ini sedang dipersiapkan untuk budidaya udang lobster bintik hitam. Kapasitas kolam 7000 ekor bibit udang lobster berukuran antara 1,5 cm – 2 cm. Pada tanggal 20 Mei 2009 bibit udang lobster diperkirakan sudah tiba dari Aceh. Dengan tingkat kematian antara 20% - 25%, dalam usia 4 bulan sudah bisa dipanen seberat 0,5 ton, setara dengan nilai uang Rp 100.000.000. Budidaya udang lobster ini dilakukan dengan cara tradisional, tanpa banyak memasukkan input pakan.

Kolam yang lain lagi berkapasitas 400 bibit kepiting bakau dan sudah siap tebar menunggu penetasan dari kolam yang pertama. Kolam yang keempat dan yang kelima sedang dipersiapkan, masih digali-gali, membongkar akar-akar dan tonggak-tonggak batang mangrove. Lokasi

ini rencananya akan menjadi pusat pembibitan benih kepiting bakau jenis sirip kuning yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus akan menjadi demplot usaha budidaya kepiting bakau di seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain kegiatan tersebut, Hermawan juga sedang mengintroduksi alat tangkap kepiting bakau (lukah) sebanyak 100 unit yang dibawa dari Pematang Siantar. Alat ini terbuat dari jaring nilon dan kerangka besi begel ukuran 6 mm, yang dibentuk seperti kurungan perangkap. Alat ini mudah dilipat-lipat, sehingga memudahkan pengoperasiannya bila harus membawa banyak alat tangkap kepiting bakau. Selain kepiting bakau, binatang yang lain juga bisa ikut terperangkap, seperti ular dan biawak. Sebagai umpan untuk menangkap adalah belut yang dipotong-potong. Harga alat tangkap per unit Rp 50.000 dan alat ini akan diberikan kepada siapa saja yang berminat dengan syarat hasil tangkapannya harus disetor kepada Hermawan. Hasil tangkapan terakhir sebagian telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal pada suatu pagi hari. Usaha budidaya kepiting dan udang lobster ini sempat ditinjau oleh tim ADB, DKP Pusat dan LIPI.

Secara teknis arah kebijakan yang ditempuh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai benar, tetapi secara administrative kegiatan ini sudah berada di luar jalur kelembagaan COREMAP II di Desa Tuapejat. Bagaimana kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan? Sebuah pertanyaan yang masih tersisa yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat.

Selain itu, kegiatan budidaya kepiting juga telah memunculkan kecemburuan sosial diantara sesama jajaran Korps TNI khususnya dan prangka buruk dikalangan masyarakat. Bendahara LPSTK sendiri merasa terbebani dengan masalah ini. Harus berbuat apa kalau ada pengawasan keuangan, dan bagaimana harus mempertanggungjawabkannya. Bagaimana pula menjelaskan kepada masyarakat bila ditanya soal ini. Kendatipun hitam di atas putih bukti

administrasi peminjaman cukup lengkap, namun tidak juga mampu mengusir kegelisahan bendahara LPSTK.

### **Kelompok Maharani**

Kelompok Maharani beranggotakan 5 orang wanita. Usaha yang dikembangkan kelompok ini adalah pengolahan ikan asin. Kelompok ini diketuai oleh Ibu Yulimar. Nama Maharani mengesankan ada hubungannya dengan nama salah satu tokoh partai politik PDIP. Namun menurut pengakuan Ibu Yulimar sama sekali tidak ada hubungannya. Nama itu diambil karena terdengar indah dan hanya selintas terbayang dalam pikiran, yang akhirnya nama itulah yang kemudian disepakati oleh seluruh anggota kelompok.

Kelompok ini dibentuk dalam kerangka mewadahi adanya bantuan dana bergulir pada paket program Mata pencaharian Alternatif COREMAP II di Desa Tuapejat. Sebelum kelompok ini terbentuk, telah didahului dengan adanya interaksi dari jajaran pengurus LPSTK dan petugas pendamping Fasilitator Desa. Ibu Yulimar sebagai salah seorang tokoh wanita setempat yang aktif di berbagai kegiatan seperti PKK, kader kesehatan, dan pengajian merasa sudah tidak asing lagi dengan cara-cara pembentukan kelompok nelayan binaan LPSTK Desa Tuapejat. Seperti yang lalu-lalu, orang yang tertarik dengan tawaran LPSTK segera mengumpulkan teman-temannya untuk diberikan pengarahan seperlunya mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan, besar pinjaman dana bergulir yang akan dikururkan, serta rincian bahan materi kegiatan dan harganya secara garis besar. Rincian secara detail dan format proposal akan segera dibuat oleh petugas Fasilitator Desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada PIU, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jauh sebelumnya yakni tahun 2005 ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok ini juga telah mengikuti kegiatan pelatihan pengolahan ikan seperti pembuatan ikan asin, kerupuk ikan, abon ikan, bakso ikan, nuget ikan, dan pindang ikan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan

melibatkan pihak ke tiga dari Universitas Riau. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti oleh tiga utusan desa yakni Desa Tuapejat, Katurai, dan Sikakap. Masing-masing mengutus 3 orang. Setelah selesai pelatihan, masing-masing desa diberikan seperangkat alat masak seperti kompor minyak tanah, baskom, wajan penggoreng, dandang, talenan, ember, manic, sendok, mesin penggiling daging, dan mesin pengelem plastik. Dari sejumlah peralatan yang masih tersisa antara lain mesin giling daging dan mesin lem plastik yang tersimpan di rumah bendahara LPSTK. Kegiatan pengolahan ikan tahun 2005 tersebut tidak berlanjut karena sulitnya pemasaran. Hasil-hasil kegiatan pengolahan ikan tidak lazim dinikmati oleh masyarakat setempat, dan lebih sesuai untuk konsumsi masyarakat perkotaan. Masalah kebiasaan makan (*food habit*) menjadi kendala utama terhentinya usaha ini.

Selanjutnya tahun 2007 kelompok Maharani mengajukan proposal. Bantuan pinjaman dana bergulir turun pada awal bulan April tahun 2008. Dana yang diajukan sebesar 13 juta rupiah, dan yang diterima sebesar 11,2 juta rupiah setelah dipotong dana pendamping LPSTK sebesar 1,86% ditambah dengan biaya administrasi. Uang tersebut kemudian dibagi rata, masing-masing anggota mendapat Rp 2.250.000. Dari sejumlah penerimaan ini, masing-masing anggota ditarik iuran untuk uang kas kelompok dan terkumpul uang sebesar Rp 350.000. Sesuai dengan bunyi kontrak yang ditandatangani antara Pokmas Maharani dengan LPSTK, pinjaman ini harus sudah dilunasi 2 tahun. Besarnya angsuran pinjaman masing-masing orang sebesar Rp 103.000, sudah termasuk bunga 0,8% per bulan. Total pengembalian kelompok per bulan sebesar Rp 515.000.

Dari uang pinjaman dana bergulir sebesar itu, menurut pengakuan Ibu Yulimar sejumlah 2 juta rupiah sudah dibelanjakan untuk membeli peralatan usaha seperti kual, ember, baskom, sendok, piring, dan gelas. Ibu Yulimar sendiri melakukan usaha jualan nasi goreng dan makanan kecil seperti kue-kue yang setiap hari dijual di sekolah SDN Tuapejat. Modal usaha ini per hari sekitar Rp 100.000, dan dari hasil jualan per hari memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp 15.000.

Sebagian keuntungan itu disisihkan dengan memasukkan uang ke dalam celengan ayam-ayaman. Dari 5 orang anggota Pokmas, baru 2 orang yang sudah menjalankan usahanya menjual jajanan makanan ringan anak-anak. Tiga orang yang lain hingga saat ini belum memulai melakukan usaha. Mereka masih terpaku pada kegiatan yang tercantum dalam proposal. Mereka dihadapkan pada suasana dilematis, mau dijalankan sesuai dengan bunyi proposal rugi, dijalankan tidak sesuai dengan usulan proposal takut salah. Usaha yang dilakukan Ibu Yulimar sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, tetapi belum pernah membayar angsuran, alasannya belum pernah diberi formulir pembayaran dari bendahara LPSTK.

Sebelumnya Ibu Yulimar pernah membuat ikan asin dalam satu bulan dua kali, yang Pertama, sejumlah 10 kg ikan segar dibeli dengan harga Rp 11.000 per kg. Setelah dibuat ikan asin susut menjadi 3 kg ikan asin kering. Harga jual per kg ikan asin hanya mencapai Rp 35.000. Semuanya laku terjual Rp 105.000, pada hal modalnya Rp 110.000, belum termasuk biaya produksi beli garam, belum termasuk tenaga menyiangi dan menjemur. Ke dua, pernah membeli ikan basah sebanyak 30 kg seharga Rp 330.000, setelah dikeringkan menjadi ikan asin susut bobotnya menjadi 10 kg, kesemuanya laku terjual Rp 350.000. Ada keuntungan tipis Rp 20.000 tidak sebanding dengan biaya produksi dan curahan tenaga kerja yang dikeluarkan.

Menurut pengakuan Ibu Yulimar, usaha pengeringan ikan asin memang tidak menjanjikan, karena konsumennya sedikit, harga bahan bakunya mahal, dan nilai jualnya rendah. Ia sendiri pernah punya pengalaman mengikuti Pameran Jambore PKK di Kota Padang pada tahun 2008. Di tempat anjungan tersebut, standnya menjual ikan asin produk nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Harga ikan asin per kg dijual Rp 70.000. Semua produk ikan asin sebanyak kurang lebih 20 kg laku terjual. Harga di pasar ikan asin per kg hanya Rp 20.000. Keunggulan produk ikan asin nelayan Mentawai adalah tidak terlalu asin, dibuat dari bahan baku ikan yang kondisinya masih segar, dan kadar kandungan airnya rendah (lebih kering dibanding dengan produk

nelayan Pesisir Selatan Sumatera Barat). Bagi sebagian orang yang mengerti nilai lebih dari ikan asin produk nelayan Mentawai, maka bisa menghargai lebih mahal. Produk ikan asin di Desa Tuapejat biasa dibeli orang sebagai oleh-oleh ke Padang, namun jumlahnya tidak banyak. Permasalahan yang lain, di desa ini juga tidak ada penampung ikan asin yang mau menampung di atas harga Rp 35.000.

Pengalaman tersebut mendorong Ibu Yulimar mengalihkan usahanya dari mengolah ikan asin menjadi penjaja makanan ringan kue-kue dan nasi goreng di SDN Dusun Kampung yang terletak di sebelah rumahnya. Kendatipun usaha yang ditekuninya tidak memberikan keuntungan yang memadai, namun tidak sedikitpun terlintas rasa kekhawatiran, kalau-kalau ia tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Menurut penuturan Ibu Yulimar, dalam kontrak pinjaman dana bergulir yang ditandatangani antara Pokmas Maharani dengan LPSTK, hanya disebutkan bila tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, pihak peminjam memang akan dikenakan sanksi, tetapi dalam bentuk apa sanksi tersebut akan diberikan, tidak dinyatakan secara tegas dalam kontrak tersebut.

Menurutnya resiko terburuk bila tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir, hanya akan diputihkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti juga nasib program kegiatan COREMAP sebelumnya. Contoh **Kelompok Reureubaga 2006**, beranggotakan 10 orang, kelompok ini melakukan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan dengan menerima bantuan sejumlah alat tangkap ikan dan mesin robin. Nilai total bantuan yang diterima masing-masing anggota sebesar 2,2 juta rupiah, harus diangsur selama 3 tahun. Pak Lisman sebagai salah satu anggota mengaku sudah melunasi hutangnya. Menurut keterangan yang disampaikan Ibu Yulimar Pak Lisman baru mengangsur 2 kali. Ia tahu dari suaminya Pak Suardi Boyong selaku ketua Pokmasnya. Anggota lainnya sama saja, belum pada melunasi hutangnya, malah ada yang belum mengangsur sekali pun.

Kenyataan ini mengindikasikan masih adanya anggapan pada sebagian masyarakat bahwa uang pinjaman tersebut adalah uang pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Pemahaman tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah memang tidak keliru, tetapi harus dikembalikan kepada LPSTK agar anggota masyarakat yang lain yang masih membutuhkan bantuan bisa ikut menikmatinya. Kesadaran ini pun, tampaknya juga tidak tumbuh. Kondisi demikian telah berakibat tidak terbangunnya motivasi usaha, bahkan ada indikasi bahwa uang bantuan pinjaman dana bergulir tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Contoh untuk beli peralatan usaha pengolahan ikan yang menelan anggaran 2 juta rupiah, apakah betul keluarga tersebut sebelumnya memang tidak memiliki peralatan tersebut? Agaknya patut diragukan. Bisa jadi sejumlah peralatan usaha yang dimiliki seperti kompor, gelas, ember, piring, mangkok, dandang, sendok dan sebagainya, tidak lain adalah perabotan dapur yang dimilikinya jauh sebelum mendapatkan pinjaman dana bergulir. Rendahnya moralitas kejujuran, tampaknya masih bersarang pada sebagian anggota Pokmas binaan LPSTK Desa Tuapejat.

### **Kelompok Musarakasimaeruk**

Kelompok ini memiliki anggota 6 orang, berlokasi di Dusun Kampung. Sesuai usulan yang tercantum dalam proposal, usaha yang dikembangkan adalah pengolahan ikan. Kelompok ini diketuai oleh Agustina. Pada bulan April 2008, dana bergulir sejumlah 11,2 juta rupiah sudah diterima. Dana tersebut digunakan untuk membuat kolam ikan yang rencananya akan mengembangkan budidaya ikan air tawar seperti ikan nila dan lele dumbo. Bibit ikan air tawar tersebut akan dibeli dari Padang. Perubahan program kegiatan Pokmas ini dilakukan tanpa sepengetahuan LPSTK, maupun petugas Fasilitator Desa. Hingga survei ini dilakukan, program kegiatan ini belum jalan karena tidak mendapat persetujuan dari PIU. Alasannya usaha ini tidak sesuai dengan program kegiatan yang diusulkan dalam proposal, sehingga PIU akan mengalami kesulitan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Disamping itu,

bila kegiatan ini dilakukan maka akan terjadi tumpang tindih dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP 2008 di Desa Tuapejat.

Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah, apa yang mendorong kelompok ini mengalihkan usahanya dari pengolahan ikan asin menjadi budidaya ikan air tawar ? Upaya untuk menggali jawaban tersebut ternyata tidak mudah. Baik pimpinan Pokmas maupun anggotanya sulit ditemui tanpa alasan yang jelas. Informasi mengenai hal itu kemudian digali dari jajaran pengurus LPSTK Desa Tuapejat.

Menurut informasi Ibu Nurmaisah Fitri selaku Bendahara LPSTK, mengatakan bahwa kelompok ini teropsesi oleh "keberhasilan" usaha budidaya ikan air tawar lele dumbo dan nila milik "Kelompok Karya Saudara" yang dipimpin oleh Andi. Kelompok ini terdiri dari 5 orang anggota. Lokasi budidaya terletak di sebelah barat daya lapangan Desa Tuapejat sekitar 500 m. Kelompok ini merupakan salah satu dari 4 kelompok yang dibentuk melalui program PEMP tahun 2008. Pinjaman modal dana bergulir yang diterima sebesar 10 juta rupiah. Kelompok lainnya yang mengembangkan budidaya ikan air tawar adalah "Kelompok Tobousogoesuk", yang artinya "Pulau Kecil". Lokasi usaha ini berada di Dusun Kampung, tepatnya di samping atas makam Desa Tuapejat, dan 2 kelompok yang lain masing-masing melakukan kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan. Bantuan yang diberikan kepada 2 kelompok yang terakhir berupa seperangkat alat tangkap ikan dan mesin robin.

Sebelum melakukan usaha ini, Andi telah mengikuti kegiatan pelatihan budidaya ikan air tawar selama satu minggu yang di selenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 – 14 Juni 2008. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dikirim 4 orang, salah satunya adalah Andi sendiri.

Untuk usaha budidaya tersebut, Andi mendatangkan bibit dari Padang sejumlah 10.000 bibit lele dumbo a Rp 150. Total dana pembelian bibit sebesar Rp 1.500.000. Selanjutnya pembelian pakan 2



karung bubuk tepung udang Rp 280.000, pellet besar 4 karung Rp 560.000, pellet 781 sebanyak 3 karung Rp 915.000, pellet polos 781 sebanyak 4 karung Rp 1.220.000, makanan tambahan 40 kg limbah kulit ayam yang diambil dari Pasar Desa Tuapejat, vitamin "Raja Lele" 1 kaleng Rp 50.000. Jumlah total biaya pembelian pakan sampai dengan umur 55 hari – 60 hari sebesar Rp 4.525.000. Modal ini belum termasuk media terpal dan bambu. Total panen diperkirakan 400 kg dengan harga jual per kg Rp 18.000 akan diperoleh Rp 7.200.000. Besar keuntungan yang akan diperoleh sekitar Rp 2.675.000.

Sebelumnya Andi telah membesarkan ikan lele sejumlah 30.000 ekor. Panen sebanyak 300 kg dengan nilai jual Rp 15.000 per kg. Total biaya produksi yang dikeluarkan Rp 5000.000. Pemeliharaan waktu itu belum dilakukan secara intensif, pemberian pakan kurang, dan bibit ikan lele banyak yang terjepit dalam lipatan terpal plastik, sehingga hasilnya tidak optimal. Nilai keuntungan hanya sekitar Rp 500.000,-. Menurut Andi, usaha budidaya ikan air tawar masih memberi keuntungan, dan pasarnya pun mudah. Banyak konsumen mencari ikan air tawar seperti warung-warung makan di Tuapejat dan penduduk transmigran di SP 1 dan SP 2. Pernah sekali hasil panen ikan lele diborong oleh pedagang ikan di SP 1 sebanyak 1 kuwintal.

Persoalan yang dihadapi dalam usaha budidaya ikan lele dumbo, antara lain belum bisa melakukan pembibitan sendiri, terutama karena kolam sering terkena air hujan, sehingga terjadi penurunan suhu air secara drastik dan terjadi peningkatan keasaman. Dalam kondisi demikian bibit ikan lele banyak yang mati karena masuk angin. Tanda-tandanya perut ikan lele dumbo membesar. Kalau masih dalam bentuk telur, biasanya telur tidak mau menetas, berwarna putih dan membusuk. Persoalan lain berupa serangan hama seperti burung patuk biru, biawak, dan lingsang yang siap memangsa ikan.

Budidaya ikan air tawar, secara ekonomis menjanjikan, dan secara estetik dapat memberikan pemandangan kolam yang indah, terutama riap ikan saat diberikan pakan. Ibu Nurmaisal Fitri sendiri

merasa betah tinggal berlama-lama di kolam Andi, sambil menikmati pemandangan.

Hal inilah yang mendorong kelompok Musarakasimaeruk mengalihkan usaha dari pengolahan ikan ke usaha budidaya ikan air tawar. Kendatipun demikian pengembangan usaha ini perlu dipertimbangkan matang-matang, Pertama tingkat keseriusan memelihara ikan ini, ke dua tingkat penguasaan teknik budidaya, dan ke tiga menyangkut pasar. Kalau dilakukan secara besar-besaran, akan diperhadapkan dengan kejenuhan pasar, mengingat jumlah penduduk Desa Tuapejat dan sekitarnya yang relatif masih jarang.

Tampaknya kondisi yang demikian menjadi pertimbangan utama sehingga PIU tidak mengizinkan pengalihan kegiatan Pokmas dari pengolahan ikan asin menjadi usaha budidaya ikan air tawar. Di Jawa, kolam-kolam ini biasa dijadikan sebagai wisata pemancingan, tetapi dalam konteks masyarakat nelayan Mentawai yang sudah terbiasa melakukan kegiatan memancing, menjadikan usaha ini tidak menarik.

### **Kelompok Sibulatnia**

Kata "Sibulatnia", berasal dari bahasa setempat Mentawai yang berarti "Yang Sebenarnya". Kelompok ini beranggota 7 orang wanita, yang diketuai oleh Ibu Nuryati. Memperoleh kucuran pinjaman dana bergulir sebesar 11,2 juta rupiah pada bulan April 2009. Pinjaman tersebut langsung dibagikan kepada seluruh anggota, masing-masing mendapat Rp 1,660.000. Sesuai dengan paket program kegiatan COREMAP II, Kelompok ini mengembangkan usaha pengolahan ikan asin.

Informasi tentang adanya bantuan pinjaman dana bergulir datang dari Kepala Desa Tuapejat, Fasilitator Teknis Desa, dan Ibu Marleini (nama yang sebenarnya Ruslaini Ketua Kelompok Maronsita). Mereka berkunjung ke warung kami menawarkan adanya bantuan dana bergulir dari program COREMAP II di Desa Tuapejat apabila bersedia

bersedia membentuk kelompok nelayan, dan melakukan usaha pengolahan ikan.

Tertarik dengan tawaran ini, Ibu Nuryati segera mengajak ibu-ibu tetangganya untuk membentuk kelompok usaha pengolahan ikan. Atas dasar usulan kelompok yang sebelumnya sudah mendapatkan pengarahan dari petugas Fasilitator Teknis dan jajaran pengurus LPSTK. Kepala Desa, maka Fasilitator Desa segera membuat proposal pengajuan untuk memperoleh bantuan pinjaman dana bergulir. Proposal tersebut diajukan pada tahun 2008. Bulan April 2009 dana pinjaman yang diajukan cair.

Sebagian besar suami anggota kelompok Sibulatnia adalah nelayan. Hanya suami Nurhayati sendiri yang berstatus sebagai pekerja serabutan, kadang menambang pasir, menjadi tukang, dan kadang mencari ikan bila tidak ada pekerjaan di darat. Rencana awal kegiatan kelompok ini adalah mengolah ikan asin dari hasil tangkapan suaminya. Saat survey dilakukan, harga ikan segar cukup tinggi. Rata-rata per kg-nya berada pada kisaran Rp 12.000 - Rp 16.000 ikan gembolo (Kembung), ikan gebur atau ikan putih Rp 20.000, ikan lemuru (sardinilla) Rp 15.000,-, dan ikan tembang Rp 12.000. Kendatipun tergolong mahal, seluruh hasil tangkapan habis terjual, sehingga tidak tersisa lagi untuk dibuat ikan asin.

Tingginya tingkat konsumsi ikan segar sangat berkorelasi dengan pola konsumsi masyarakat setempat yang lebih menyukai ikan segar dibanding dengan ikan asin, sehingga tingkat permintaan pasar terhadap ikan asin rendah. Dengan harga rata-rata Rp 35.000 per kg, masih jauh lebih tinggi dibanding dengan harga pasar di Kota Padang yang hanya mencapai Rp 20.000 per kg.

Kelangkaan bahan baku di satu sisi dan rendahnya permintaan pasar ikan asin di sisi lain, menunjukkan bahwa secara ekonomis usaha pengolahan ikan asin memang tidak menjanjikan. Kondisi ini mendorong kelompok Sibulatnia mengurungkan niatnya untuk mengolah ikan asin dan mengalihkan usahanya pada kegiatan

penangkapan ikan. Bantuan pinjaman dana bergulir pada sebagian anggota digunakan untuk menambah modal beli mesin robin, sebagian anggota yang lain yang sudah memiliki alat tangkap dengan perahunya digunakan untuk menambah ongkos rangsum melaut. Sementara Ibu Nuryati sendiri selaku ketua kelompok memanfaatkan pinjaman dana bergulir tersebut untuk menambah modal usaha warung kelontongnya. Dengan suntikan modal ini, barang dagangannya menjadi bertambah banyak, seperti aneka minuman, jajanan anak dan rokok. Sebelumnya hanya menjual Super Mie dan kue-kue kering. Dalam 1 hari omset usahanya mencapai antara Rp 250.000 - Rp 300.000. Keuntungan yang diperoleh antara Rp 15.000- - Rp 25.000. Sebagian hasil usaha ini sudah bisa untuk menambah kebutuhan lauk pauk dan beras sehari-hari. Sebagian dari keuntungan usaha ini disisihkan untuk mengembalikan pinjaman.

Saat survei dilakukan, kelompok ini sudah siap menyeter cicilan ke dua yang jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2009. Dalam satu kali setoran sebesar Rp 596.000 sudah termasuk bunga sebesar 0,86%. Masing-masing orang menyeter Rp 85.000. Diantara anggota kelompok Sibulatnia ada suatu kesepakatan bersama bila ada salah satu anggota yang terlambat dalam mengangsur pinjaman, akan dikenakan denda sebesar Rp 5000. Uang denda ini akan dikumpulkan menjadi uang kas kelompok.

Antisipasi yang lain untuk tetap dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir, kelompok ini juga sedang merencanakan kegiatan simpan pinjam sebesar Rp 15.000 per orang, dengan rincian Rp 10.000 untuk simpanan pokok, dan Rp 5000 untuk simpanan wajib. Sesuai dengan hasil rapat kelompok, kegiatan ini akan dilakukan sebulan sekali yang jatuh pada tanggal 15, bersamaan dengan pertemuan rutin kelompok. Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil usaha, apakah dengan suntikan dana ini usahanya berkembang atau tidak. Kendatipun lama usaha baru berusia 2 bulan, menurut keterangan yang disampaikan Ibu Nuryati, pinjaman tersebut paling tidak bisa membantu nelayan dalam menyediakan ransum dan bahan bakar bagi nelayan.

Sementara itu, bagi Ibu Nuryati sendiri, usaha warung kelontongnya telah dirasakan dapat mengisi waktu luang suaminya, sehingga minimal dapat mengurangi frekuensi kegiatannya menambang pasir laut.

Kuatnya komitmen dari kelompok ini untuk tetap dapat mengembalikan pinjaman melalui berbagai langkah antisipasi, merupakan tindakan terpuji yang patut dihargai. Kendatipun usahanya baru mulai melangkah, tetapi langkah pertamanya merupakan modal kuat buat peneguhan kelompok bahwa dana yang diperolehnya bukan merupakan uang yang diberikan secara percuma. Melalui pertemuan rutin kelompok dan aturan kesepakatan yang dibuat, anggota kelompok merasa selalu diingatkan dengan kuwajibannya.

Pengawasan internal ini, ternyata lebih efektif, dan sekaligus dapat mengatasi kelemahan kontrol yang dilakukan oleh LPSTK maupun petugas pendamping

### **Kelompok The Good Family**

Kelompok ini terdiri dari 5 orang kakak beradik. Kelompok ini diketuai oleh Novemberudin (anak bungsu dari 5 bersaudara) Nama ini diilhami oleh visi Dinas Pariwisata yang mencanangkan tahun kunjungan wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2008 “Visit Mentawai Islands 2008”. Nama itu sekaligus dijadikan sebagai sebuah identitas keluarga dengan mengedepankan segi moralitasnya yakni “keluarga yang baik”. Pengakuan ini sekaligus menepis adanya anggapan bahwa kelompok ini sengaja mencari sensasi dengan tampil beda.

Asal mula terbentuknya kelompok ini diawali dari pembicaraan antara petugas Fasilitator Teknis Desa dengan seorang pekerja buruh bongkar muat kapal di Pelabuhan Tuapejat. Orang tersebut bernama Novemberudin salah seorang warga Dusun Jati, yang pekerjaan utamanya adalah sebagai buruh pelabuhan. Pada hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, Novemberudin selalu berada di pelabuhan. Karena jadwal pelayaran

tidak terlalu padat, maka masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan. Sebagai buruh kasar pelabuhan, pendapatan yang ia peroleh tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Dalam keseharian ia selalu berpikir dan berusaha mencari pekerjaan sambilan guna menambah pendapatan ekonomi rumah tangganya. Ibarat bagai pepatah “Pucuk ditimpa ulam tiba”, ia bertemu dengan seorang petugas pendamping program kegiatan COREMAP II Desa Tuapejat di pelabuahn. Kepada petugas tersebut, ia memohon dengan rendah hati agar dikabulkan permintaannya untuk ikut terlibat dalam program kegiatan MPA COREMAP II di Desa Tuapejat.. Ia juga menyatakan bersedia menjadi kelompok nelayan binaan LPSTK Desa Tuapejat. Pada saat yang sama petugas Fasilitator Desa pun sedang mencari-cari orang yang bersedia mengelola program budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Novemberudin kemudian “dikondisikan” sedemikian rupa agar segera membentuk Pokmas, dan menjadi target sasaran binaan Fasilitator Teknis Desa Tuapejat.

Secara kebetulan kakak ipar Novemberudin (istri kakak tertua) duduk sebagai bendahara LPSTK Desa Tuapejat. Kepada kakak-kakaknya, keinginannya tersebut dibicarakan secara kekeluargaan. Dari hasil pembicaraan tersebut lahir kesepakatan untuk membentuk satu kelompok nelayan yang diberi nama “The Goot Famely”. Kelompok ini akan mengelola kegiatan budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA).

Setelah kelompok ini terbentuk, maka Novemberudin mulai membuat kalkulasi biaya. Hasil kalkulasinya menyebut kisaran angka 113 juta rupiah untuk dapat secara layak mengoperasikan usaha budidaya ikan kerapu 1 unit KJA. Hitungan itu ia lakukan setelah melalui survey bersama seorang petugas Balai Benih Sikakap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun melalui petugas pendamping, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai PIU telah mematok plafon sebesar 50 juta rupiah.

Kendatipun jauh dari kalkulasi awal yang ia inginkan, ia tetap bersedia menerima tawaran sebesar 50 juta rupiah. Persetujuan ini kemudian segera ditindaklanjuti oleh petugas Fasilitator Desa dengan membuat proposal. Pada bulan Juni 2008 proposal tersebut diajukan ke PIU. Pada bulan Juli 2008 untuk keperluan pengelolaan program budidaya ikan kerapu, dan budidaya rumput laut, maka dikirimlah 2 orang anggota Pokmas warga Desa Tuapejat ke Balai Benih Lampung milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, bersama dengan rombongan dari Siberut 4 orang, dan Sikakap 6 orang, termasuk salah satu diantaranya adalah Kepala Balai Benih Hatchery Sikakap. Selama 1 minggu di tempat pelatihan tersebut masing-masing peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang akan ditanganinya.

Di mata Novemberudin seorang pejabat Kepala Balai Benih Sikakap adalah seorang ahli pembudidaya ikan kerapu yang diakui kepiawaiannya. Menurut pengakuannya, pada saat banyak orang petani nelayan pembudidaya ikan kerapu di Lampung belum bisa menetasakan telur dari indukan ikan kerapu macan, petugas DKP tersebut sudah berhasil melakukan penetasan ikan kerapu macan melalui inseminasi suntikan.

Berbekal pelatihan budidaya ikan kerapu selama 1 minggu, seberkas foto copy modul pelatihan budidaya, kesediaan petugas Balai Benih Hatchery Sikakap untuk mendampingi kegiatan budidaya ikan kerapu dengan sistem KJA, jaminan pengadaan benih melalui hatchery Sikakap, serta kesediaan hatchery Sikakap untuk memasarkan hasil panen usaha budidaya ikan kerapu, telah membuat Novemberudin merasa optimis bahwa usaha yang akan digelutinya akan berhasil. Pengalaman kegagalan usaha yang sama pada tahun 2007, tidak membuat ia ragu menjalankan rencana usahanya. Menurut penilaiannya, kegagalan tersebut karena ditangani oleh orang-orang yang kurang berpengalaman dan bukan ditangani oleh orang yang tidak biasa bekerja di laut.

Pada bulan Maret 2009 pinjaman dana bergulir yang ia harapkan cair. Tanpa melalui musyawarah diantara anggota Pokmas,

selaku ketua Pokmas ia segera mengambil uang tersebut untuk kemudian dibelanjakan bahan material berupa waring, 23 buah drum plastik, kayu balok, kayu papan, seng, paku, tali dan baut. Saat survey dilakukan, barang-barang tersebut sebagian tersimpan di kolong rumah panggung miliknya, dan drum-drum plastik ditaruh pada tanah pekarangan di samping rumah. Menurut pengakuannya, total dana yang sudah dikeluarkan sebesar 33 juta rupiah, 30 juta rupiah berasal dari pinjaman dana bergulir, dan 3 juta rupiah berasal dari uang pribadi. Pengakuan ini dikuatkan oleh keterangan istrinya.

Untuk dapat memasang 1 unit keramba jaring apung dengan ukuran 3,5 m x 3,5 m sejumlah 4 lubang, masih dibutuhkan anggaran sebesar 6 juta rupiah, termasuk untuk membeli papan kayu yang masih ada kekurangan sebanyak 0,6 m<sup>3</sup>. Sementara itu menurut keterangan seorang petugas Motifator Desa yang sekaligus merangkap sebagai bendahara LPSTK, dikatakan bahwa salah satu kendalanya adalah soal sulitnya pengadaan kayu di Desa Tuapejat. Kesulitan ini disebabkan oleh tertangkapnya seorang pedagang kayu di Desa Tuapejat oleh petugas keamanan, karena kayu yang diperdagangkan diduga hasil kegiatan yang dikategorikan sebagai *illegal logging*.

Untuk mengatasi masalah ini, pengadaan kayu bisa dilakukan dengan meminta izin penebangan kepada Dinas Kehutanan, agar dibuatkan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH). Namun untuk mendapatkan surat keterangan tersebut harus ditempuh melalui jalur birokrasi yang panjang, serta tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Biaya ini tidak sebanding dengan jumlah kayu yang akan diperlukannya.

Menurut pengakuan Novemberudin, pengadaan kayu tersebut sesungguhnya mudah dilakukan cukup dengan membeli kayu di P. Beribanua yang lokasinya kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Desa Tuapejat. Harga kayu jenis meranti per m<sup>3</sup> di tempat tersebut sekitar 2 juta rupiah. Sampai saat ini pengadaan kayu untuk pembuatan KJA sudah mencapai 80%, dan masih ada kekurangannya 20% atau sekitar 0,6 m<sup>3</sup>.



Informasi yang disampaikan oleh petugas pendamping desa menyatakan bahwa dalam pengadaan bahan material keramba jaring apung diduga kuat ada indikasi penyimpangan penggunaan administrasi keuangan dalam bentuk penggelembungan anggaran (*mark up*). Contoh, harga 1 batang baut mencapai Rp 100.000, harga 1 buah drum plastik mencapai Rp 600.000. Harga ini tertera dalam kuitansi. Harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran setempat. Contoh harga 1 buah drum plastik di pasaran setempat hanya Rp 300.000. Baut 20 cm di pasaran setempat hanya pada kisaran antara Rp 10.000 - Rp 15.000.

Menurut perhitungan dari seorang tukang yang pernah mengerjakan sejumlah 18 buah KJA di Sikakap suatu proyek yang didanai dari APBD 2007, untuk membuat 1 unit KJA 4 lubang siap operasi, dibutuhkan anggaran sekitar 24 juta rupiah. Rinciannya adalah : kayu papan 0,5 m<sup>3</sup> Rp 1000.000; kayu balok 1 m<sup>3</sup> Rp 2.000.000; seng Rp 400.000; drum 24 buah Rp 7.500.000; baut 48 buah Rp 480.000; tali pengikat drum 10 kg Rp 300.000; waring Rp 6000.000; paku 5 kg Rp 100.000; jangkar 2 buah Rp 1.000.000; 1 bal tali ukuran 0,5 inci Rp 1.500.000 dan upah kerja sekitar Rp 3.000.000. Total bersih kebutuhan material Rp 23.200.000. Perlu diketahui bahwa yang mengajari rincian tersebut adalah petugas Balai Benih Hatchery Sikakap dalam membuat proposal pengajuan program kegiatan KJA di Sikakap. (Sumber wawancara dengan Oyong Taylor, 21 Mei 2009)

Di Desa Tuapejat, KJA milik Pokmas The Good Family sudah menelan anggaran 30 juta lebih, tetapi belum juga cukup materialnya. Pada hal "tenaga konsultan" Pokmas ini adalah orang yang sama yang pernah diajari dalam menyusun anggaran pembuatan sejumlah 18 KJA di Sikakap oleh Pak Oyong Taylor.

Sisa dana sebesar 20 juta rupiah sudah berulang kali diminta oleh Novemberudin, tetapi dengan alasan kesulitan pengadaan kayu, uang tersebut tetap masih ditahan oleh bendahara LPSTK. Jawaban yang selalu diperoleh adalah akan segera dibicarakan dengan ketua LPSTK. Hingga saat survey dilakukan (11 Mei 2009), persoalan ini belum pernah dimusyawarahkan dengan anggota-anggotanya. Begitu juga

belum pernah sekalipun mengadakan pertemuan, sejak terbentuknya kelompok ini

Dari ke 5 kakak beradik dalam kelompok ini, nampaknya hanya Novemberudin sendiri yang memiliki keinginan kuat untuk menjalankan usaha ini. Sementara kuat dugaan bahwa anggota yang lain masih meragukan kemampuan Novemberudin dalam mengelola usaha ini. Kuatnya keinginan Novemberudin yang ditunjukkan dengan tindakan setengah memaksa kepada anggota Pokmas lainnya, bila tidak disikapi dengan cara hati-hati, bisa mengarah pada terganggunya harmoni sosial hubungan keluarga.

Menurut rencana, KJA ini akan ditempatkan berdekatan dengan keramba jaring apung milik Tampubolon yang dibeli dari PT. Sindula (milik Bupati Kepulauan Mentawai). Keramba tersebut berlokasi di Pesisir Pantai P. Makakang tepatnya di belakang P. Hawera/Naubak (banyak batu). Untuk menuju lokasi tersebut dari tempat tinggal Novemberudin di Dusun Jati akan memakan waktu tempuh sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu robin. Pertimbangannya kenapa lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut cukup terlindung dari gelombang air laut dan badai.

Melihat lokasi yang ditunjuk, sungguh suatu tempat yang cukup jauh. Tidak terbayangkan bagaimana di saat musim badai, orang harus berlayar mendatangi KJA untuk sekedar memberi pakan, terpaksa harus menempuh perjalanan yang penuh resiko. Dan itu harus dilakukan tiga kali dalam sehari. Menurut pengakuannya, ikan tersebut akan diberi pakan alami, berupa ikan tamban yang banyak tersedia di perairan tersebut, terutama pada saat cuaca baik. Bagaimana halnya pada saat cuaca buruk, gelombang laut kuat dan ikan tamban sulit didapat, apakah ikan harus dibiarkan kelaparan ? Suatu resiko yang tidak sedikit pun terpikir di benak Novemberudin.

Saat ditanya bagaimana kesan dan pelajaran apa serta pengalaman yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan di Lampung. Ia menjawab dengan penuh percaya diri. Ada beberapa hal

yang harus diperhatikan dalam berbudidaya ikan kerapu, antara lain mengenali penyakit jamur kulit, jamur otak (kanker otak) yang ditandai dengan gerak ikan yang lincah, tapi ikan tidak mau makan. Lalu ikan stress saat dipindahkan dari suatu tempat ke lain tempat. Kemudian sifat kanibal ikan kerapu, apabila dicampur ukuran besar dan kecil serta kurang pemberian pakan.

Saat diminta untuk membandingkan kelengkapan peralatan, pakan, obat-obatan, dan infrastruktur penunjang budidaya dan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki antara Balai Benih Lampung dengan Balai Benih Sikakap dan persiapan KJA di Pokmas The Good Family Desa Tuapejat, dengan sadar ia mengakui sangat jauh perbedaannya. Di Lampung semua peralatan teknologi budidaya dan laboratorium sudah sangat canggih.

Kendatipun demikian, tantangan dan kondisi tersebut tidak membuat Novemberudin menyurutkan langkahnya untuk tetap akan mengemban “tugas sejarah” mengubah kebiasaan berburu menangkap ikan (berburu meramu) menjadi nelayan yang bisa menghargai sebuah proses produksi yang panjang melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti pembenihan, penangkaran benih, pemeliharaan dan pemanenan. Dengan tegas ia mengatakan teknologi budidaya itu yang ingin dilakukan, dan bukan hanya sekedar menampung dan menjualnya. Praktik yang selama ini lazim dilakukan oleh nelayan setempat.

Kini tinggal dua pertanyaan, apakah Novemberudin memang belum terjaga dari mimpi indahanya, atau sengaja ia menjaga mimpi itu demi memperoleh keuntungan material sesaat? Hanya Novemberudin sendirilah yang bisa menjawabnya. Sementara itu, buruknya kinerja Pokmas The Good Family, apabila program ini dipaksakan, kuat dugaan justru bisa memunculkan konflik keluarga. Pada ujungnya kegagalan budidaya KJA, akan menjadi taruhan citra Pokmas. Dari The Good Family menjadi The Bad Family.

## Kelompok Mandiri Baru

Kelompok ini memiliki anggota 5 orang dan diketuai oleh Zaenal Husni, yang sehari-harinya biasa dipanggil dengan nama Pak Ogek. Kelompok ini berdomisili di Dusun Tuapejat. Usaha yang dikembangkan adalah budidaya rumput laut. Lokasi budidaya rumput laut terletak di sebelah selatan pelabuhan Tuapejat, kurang lebih 20 menit waktu tempuh dengan menggunakan mesin robin dari pantai pelabuhan Tuapejat. Lokasi kegiatan rumput laut berada di muara sungai di tengah-tengah hutan mangrove. Lokasi tersebut berupa perairan berlumpur campur pasir putih, kedalaman air kurang lebih 1 m pada saat air laut surut. Pada saat musim penghujan, lokasi ini rawan terhadap limpasan air hujan yang berasal dari lereng-lereng pantai dan tanah darat sekitarnya. Saat penelitian ini dilakukan, Pak Ogek sedang mempersiapkan pemasangan keramba jaring untuk petak yang ke dua.

Usaha budi daya rumput laut dikembangkan dengan sistem keramba jaring yang terbuat dari "waring". Sistem ini dipilih dalam upaya menghindari serangan ikan kecil. Adapun beberapa jenis ikan pemangsa rumput laut antara lain, ikan duyung, ikan teri tamban, dan ikan baronang.

Luas petak keramba jaring budi daya rumput laut sekitar 300 m<sup>2</sup>, dengan ukuran lebar 15 m dan panjang 20 m. Jaring (waring) setelah dijahit kemudian dibentangkan di tanah lapang pelabuhan, dengan cara menarik tali ris di keempat sisi jaring. Tali ris di keempat sisi jaring kemudian dikaitkan dengan rakit bambu. Rakit-rakit bambu yang mengelilingi waring tersebut kemudian pada bagian atasnya diperkuat dengan papan-papan kayu yang berfungsi sebagai penahan gelombang, sekaligus tempat orang berjalan membersihkan rumput laut dengan cara menggerak-gerakkan tali yang mengikat sederet rumpun rumput laut.

Bahan material untuk membuat 1 unit petak rumput laut menghabiskan 15 gulung waring yang harganya per gulung Rp 500.000. Total harga waring Rp 7.500.000. Bambu rakit Rp 1.000.000. Tali ris Rp 500.000 dan ongkos pasang serta menanam sekitar Rp 300.000. Biaya produksi ini belum termasuk uang rangsum dan rokok. Total

pengeluaran untuk membuat 1 unit keramba jaring rumput laut sebesar Rp 9.000.000.

Dalam 1 unit keramba jaring dapat ditanam bibit rumput laut seberat 100 kg. Harga bibit rumput laut di tempat a Rp 20.000. Bibit ini dibeli dari Sikakap. Menurut informasi Pak Ogek, dalam usia 45 hari, rumput laut sudah bisa dipanen dengan hasil seberat kurang lebih 1 ton basah. Saat survei dilakukan, rumput laut yang ditanam Pak Ogek baru berumur 25 hari. Diperkirakan produksi rumput laut baru menghasilkan bibit 100 kg.

Pertumbuhan tanaman rumput laut ini menurut Pak Ogek termasuk lambat, sebab bibitnya tidak baik. Melalui seorang petugas Balai Benih Hatchery Sikakap, hanya diberikan pangkal rumput laut (bonggolnya) saja yang sudah dalam keadaan dirangkai dan dimasukkan ke dalam box stereo-form. Kondisinya sudah tidak rapi karena sebagian ikatan-ikatannya sudah pada lepas.

Menurut Ogek sesuai dengan petunjuk budi daya yang ia peroleh dari pelatihan selama 1 minggu di Balai Benih Lampung, disebutkan bahwa bibit rumput laut yang bagus adalah dari bagian tangkai dan pucuk daun. Benih ini harus tampak segar dan berwarna cerah (transparan). Kendatipun kondisi bibit rumput laut yang dibeli dari Sikakap kondisinya kurang baik, bibit itu terpaksa ia terima.

Untuk memasang petak yang ke dua, Pak Ogek dihadapkan dengan beberapa persoalan, antara lain uang yang tersisa masih di tangan Sekretaris Kelompok, cuaca kurang baik karena sedang ada badai, dan "persoalan lingkungan". Apa yang dimaksud dengan persoalan lingkungan di sini adalah menyangkut status wilayah perairan. Salah satu warga suku Taikatubooinan mengancam mau membongkar 1 unit keramba jaring rumput laut yang telah ada kendatipun Pak Ogek untuk memasang keramba di lokasi tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, Kepala Dusun, dan petugas kepolisian setempat. Orang tersebut tetap pada pendiriannya mau membongkar keramba jaring rumput laut yang ada.

Sebaliknya keadaan ini tidak pernah membuat Pak Ogek gentar menghadapi ancaman tersebut, dan tetap mau melanjutkan usahanya menanam rumput laut. Harapannya apabila hasil panennya bisa digunakan untuk mensuplay pasokan benih untuk pengembangan program kegiatan budi daya rumput laut COREMAP II yang akan datang yakni tahun anggaran 2009, dengan harga Rp 20.000 per kg. Dengan total panen 2 ton saja sudah akan terkumpul uang sebesar 40 juta rupiah. Pendapatan sebesar itu sudah dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman sebesar 15 juta rupiah, yang bersihnya hanya diterima sebesar 14 juta rupiah.

Resiko terburuk yang dihadapi Pak Ogek adalah gagal panen. Jika itu yang dialami, Pak Ogek sudah mendekati pimpinan PIU untuk mendapatkan tambahan pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Dengan tambahan pinjaman sebesar itu rencananya akan digunakan untuk usaha pengolahan ikan asin. Ia optimis usaha ikan asin akan memberi keuntungan yang menjanjikan selama bahan bakunya dicari sendiri. Sebagai nelayan ia mengaku menguasai tempat-tempat pencarian ikan. Untuk mengoptimalkan pendapatan nelayan, seseorang harus berani tinggal antara 3 – 5 hari di laut, agar bisa menutup biaya operasional. Kelemahan nelayan di sini adalah pulang pergi melaut dalam satu hari, sehingga rugi bahan bakarnya. Sebagai nelayan yang berasal dari Sumatera Utara, Pak Ogek juga memiliki banyak relasi di Padang dan Medan yang bersedia menampung hasil usahanya.

Usaha budidaya rumput laut yang sekarang ini dilakukan, hanya ditangani secara pribadi, 4 orang anggota yang lain yang terlibat dalam kegiatan pemasangan jaring keramba budidaya rumput laut hanya diupah sebesar Rp 75.000 per hari. Menurut pengakuannya, anggota yang lain tidak aktif karena takut menanggung resiko gagal panen, yang justru akan membuat seseorang terperangkap dalam jebakan hutang.

### 2.2.2. Partisipasi dan Manfaat

Terminologi partisipasi lazim diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam kegiatan program. Sering pula partisipasi dikontraskan dengan kata mobilisasi. Antara sosialisasi dengan mobilisasi sama-sama mengandung arti terlibat dalam suatu kegiatan. Secara kualitas, keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan bisa dibedakan, mobilisasi menunjukkan bahwa keikutsertaan seseorang ada unsur keterpaksaan karena ada pihak yang memaksa, baik dengan cara kasar maupun dengan cara halus, sedang partisipasi aktif seseorang pada suatu kegiatan tidak ada unsur keterpaksaan karena tumbuhnya motifasi yang mendorong orang untuk terlibat dalam suatu kegiatan secara suka rela.

Secara kualitas dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada suatu kegiatan Boyle (1981) menyatakan, antara lain :

- (1) Partisipasi dari suatu warga komunitas dalam suatu kegiatan dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mendidik suatu warga komunitas tersebut. Hal ini penting karena akan menghasilkan pengertian, consensus, rasa tanggungjawab, dan keputusan yang bijaksana.
- (2) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai, karena dengan ketiadaan partisipasi menunjukkan bahwa suatu kegiatan sesungguhnya tidak diterima keberadaannya oleh masyarakat.
- (3) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang digalakkan untuk mendorong lahirnya inisiatif, kreatifitas, kepercayaan diri, dan munculnya keswadayaan masyarakat.
- (4) Keterlibatan masyarakat akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat dan juga untuk menghindari salah konsepsi para petugas.

Seberapa besar kadar partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat, secara kualitas bisa diketahui dari fenomena sosial sebagaimana telah ditunjukkan oleh pernyataan tersebut di atas. Secara kuantitas bisa diukur dengan

besarnya jumlah penduduk yang terlibat pada program kegiatan COREMAP. Kedua alat ukur ini akan dicoba untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat pada program kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat.

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dari sebanyak 128 responden, sejumlah 16 orang atau sebesar 12,5 persen menjawab pernah menerima bantuan, selebihnya sejumlah 112 orang atau sebesar 87,5 persen menyatakan tidak pernah menerima bantuan. Sementara itu berdasarkan jenis bantuannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2.  
Distribusi Jenis dan Penggunaan Bantuan yang Diterima

No	Jenis bantuan	Jumlah penerima	%
1	Uang	14	10,9
2	Peralatan	2	1,6
Jenis penggunaan			
1	Modal usaha dagang	1	0,8
2	Modal usaha budi daya	4	3,1
3	Membeli/perbaikan alat tangkap	9	7,0
4	Lainnya	1	0,8

Sumber: Data primer Aspek Sosial Trumbu Karang Indonesia 2005,2007,2009,

Secara kuantitas tampak bahwa keterlibatan masyarakat pada program kegiatan COREMAP terlalu kecil, disbanding dengan besarnya volume kegiatan dan jumlah orang yang masuk menjadi anggota Pokmas. Ada kemungkinan bahwa responden yang diwawancarai memang tidak menjadi anggota Pokmas dan tidak pernah menerima berbagai bentuk bantuan dari program kegiatan COREMAP. Karena itu, angka tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya menyangkut keterlibatan masyarakat. Kendatipun demikian, kesulitan ini bisa dijembatani dengan indikator kualitatif sebagaimana telah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Berdasarkan indikator kualitatif, mengamati jalannya program kegiatan di lapangan, memang harus diakui masih jauh dari apa yang dikemukakan Boyle (1981) rasa tanggung jawab rendah, belum mampu



menggali swadaya masyarakat, tidak mampu mendorong lahirnya kreatifitas dan inisiatif lokal.

### **2.2.3. Permasalahan dan Kendala Sosial**

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas, mengindikasikan bahwa program kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Kendala tersebut antara lain : (1) Secara teknis volume program kegiatan COREMAP terlalu banyak dan terpencar-pencar lokasinya, sehingga menyulitkan dalam pengelolaannya. (2) Menyangkut kesiapan SDM, baik pada pihak petugas yang terlibat maupun masyarakat sebagai sasaran kegiatan, sesungguhnya sama-sama belum memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani berbagai kegiatan MPA yang diintroduksi. Kelemahan ini diakui baik oleh pihak PIU (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai). Kendala ini mendorong pihak PIU menggandeng mitra kerja sebuah LSM Karekat yang dipandang memiliki kemampuan dalam menangani dan mendampingi program kegiatan COREMAP, tetapi kemampuan SDM yang dimiliki LSM tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki pihak PIU (DKP). Akibatnya saling mengandalkan dan saling menyalahkan diantara ke dua instansi tersebut, membuat lemahnya koordinasi diantara ke dua lembaga yang bertanggungjawab penuh mengawal jalannya program kegiatan COREMAP di Desa Tuapejat.

Indikasi lain yang menunjukkan kelemahan SDM pada pihak pelaksana kegiatan COREMAP, tampak kurangnya persiapan yang matang sebelum kegiatan dilakukan. Idealnya setiap item kegiatan harus ditempuh melalui studi kelayakan yang melibatkan dari berbagai disiplin ilmu dan tenaga ahli dibidangnya, sehingga kelayakan teknis, ekonomis, dan ekologis bisa dipertanggungjawabkan. Kendatipun persoalan ini telah dianggap sebagai persoalan klasik, tetapi justru hal ini merupakan kendala yang paling utama.

Masih menyangkut kelemahan SDM, dari segi pendekatan sosial budaya, tampaknya pihak pelaksana kegiatan tidak memahami sepenuhnya kondisi sosial budaya masyarakat binaannya. Kasus pencurian dan pengrusakan DPL, terulang lagi pada kejadiannya. Kasus yang sama juga dihadapi pada kegiatan budidaya rumput laut. Pak Uge selaku pimpinan Pokmas Rumput laut telah menerima ancaman dari salah seorang warga setempat, bahwa keramba jarring budi daya rumput laut yang ada mau dibongkar dan meminta untuk mengurungkan niatnya memasang keramba jarring yang ke dua. Menghadapi kendala seperti ini, pihak pelaksana lebih suka menempuh jalan menggunakan pendekatan formal dengan meminta izin kepada pemerintah desa dan keamanan. Dengan pendekatan demikian, tidak ada jaminan bahwa lokasi kegiatan budidaya rumput laut akan terbebas dari gangguan masyarakat.

Lemahnya kemampuan SDM pada pihak "*agent of change*" di satu sisi, dan implementasi kegiatan yang menjadikan masyarakat sebagai kelompok sasaran sebagai arena percobaan, telah berakibat fatal bagi pihak kelompok sasaran. Kegagalan dalam bereksperimen telah berakibat; mereka terlibat hutang. Mereka kecewa dan frustrasi, karena tidak ada tempat untuk bertanya mengatasi masalah yang dihadapi. Fikiran, tenaga dan harta telah menyita perhatian Pokmas, tetapi hasilnya jauh dari yang dijanjikan.

Dalam kaitan dengan inovasi baru patut dikemukakan, bahwa suatu inovasi baru akan ditolak masyarakat apabila inovasi itu terlalu rumit, dan orang dituntut untuk mempelajari prosedur baru yang terlalu banyak, maka kemungkinan bahwa inovasi itu akan ditolak (Rogers dan Burge, 1972, 353-354). Dalam kaitan dengan program kegiatan yang diintroduksi, bagi masyarakat setempat memang dirasakan memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan yang tinggi baik menyangkut segi kelembagaan maupun teknis kegiatan. Sangat disayangkan kondisi seperti ini tidak diimbangi oleh kegiatan pendampingan yang memadai.

Kendala ke (3) menyangkut pendekatan yang digunakan, ada kesan kuat penilaian hitam putih antara pendekatan yang bersifat *top-*

*down* dengan *bottom up*, yang bersifat *top-down* lebih buruk dibanding dengan pendekatan yang bersifat *bottom up*, pada hal ke duanya hanya sekedar alat, efektifitasnya tergantung situasional. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Realitasnya program kegiatan COREMAP bersifat *top-down*, betapa pun rekayasa sosial telah dilakukan oleh pihak pelaksana melalui berbagai upaya “pengkondisian”, seperti bujuk rayu dalam menawarkan program kegiatan yang sudah dirancang kepada kelompok sasaran.

Tidak salah mereka melakukan rekayasa sosial seperti itu, dan tidak perlu risau dengan pendekatan yang bersifat *top-down*, sepanjang ditunjang oleh kesiapan SDM yang memadai, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dikawal dengan ketat, dan dapat dilewati tanpa masalah. Lagi-lagi disinilah sumber masalah utamanya, ketidaksiapan petugas pelaksana yang bertindak sebagai agen perubahan. Posisinya yang demikian, semestinya mereka menyadari bahwa masyarakat sasaran sesungguhnya memiliki sifat dasar yang melekat pada dirinya. Masyarakat nelayan, seperti halnya masyarakat pedesaan pada umumnya, telah mengidap kelemahan dasar, yakni terbatasnya wawasan dan kemampuan berfikir, rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki, terbatasnya cadangan pangan dan modal. Dengan segala keterbatasannya itu maka membuat tidak tumbuhnya budaya bereksperimen, sebab bila terjadi kegagalan akan berakibat fatal bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga mereka. Kurang inovatif (*innovativeness*) merupakan sifat dasar yang melekat pada masyarakat pedesaan yang tergolong miskin. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan lebih suka bersikap menunggu dan melihat dalam merespons setiap bentuk inovasi baru. (Jefta Leibo, 1995, 70 – 77)

### 2.3. PROGRAM BANTUAN FISIK DESA

Informasi awal mengenai program COREMAP II di Desa Tuapejat diperoleh dari data yang ada pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dinyatakan bahwa Pokmaswas kondisinya baik, kendatipun kegiatan belum dapat

dilakukan secara optimal karena tidak berfungsinya perahu pompong sebagai prasarana kegiatan pengawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) khususnya dan kawasan perairan Tuapejat pada umumnya. Lokasi DPL juga sudah dibangun dengan mengambil lokasi di Resort Aloita seluas 51,30 ha, terletak di belakang P. Hawera. Lokasi ini sudah ditetapkan dengan Surt Keputusan Desa No: 1/KD – TPI/VIII/Tahun 2006. Program pengadaan Prasarana Sosial seperti; bangunan Pondok Informasi, dermaga tambat perahu, dan sanitasi lingkungan berupa tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) umum sudah direalisasikan dan kondisinya cukup baik. Kegiatan Matapencarian Alternatif (MPA) juga sudah berjalan. Kegiatannya meliputi; usaha pengolahan ikan, Keramba Jaring Apung (KJA), penangkapan ikan ramah lingkungan, penyulingan minyak nilam, budidaya rumput laut, dan budidaya kepiting bakau. Sampai dengan tahun 2008 sudah terbentuk 8 Pokmas yang telah merekrut anggota sebanyak 124 orang. (Catatan Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2009)

### **Keberadaan Pokmaswas**

Pokmaswas beranggotakan 5 orang, dipimpin oleh Yonizon Gelinehe. Tujuan utama dibentuknya kelompok ini adalah untuk mengawasi lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL), namun karena terkendala oleh pengadaan prasarana transportasi dari sejak awal berlangsungnya program COREMAP di Desa Tuapejat, praktis keberadaan Pokmaswas ini tidak dapat menjalankan tugasnya.

Perahu pompong sebagai prasarana kerja, tampaknya memang sudah cacat sejak lahir. Perahu ini cukup besar, berbobot 3 GT dilengkapi dengan mesin diesel 23 PK. Perahu ini dibuat pada tahun 2005 di Padang, dan selanjutnya diserahkan kepada LPSTK yang lama tahun 2006. Saat diserahkan waktu itu baru ada perahunya, mesinnya belum ada. Perahu tersebut diletakkan di pantai tanpa mendapat perawatan semestinya. Perahu itu kemudian dilengkapi dengan mesin diesel merek "Sangchai". Karena peralatannya tidak lengkap, seperti tidak ada radio komunikasi HT, kompas, baterai, dynamo stater, GPS,

dan jangkar, maka Pokmaswas yang lama tidak mau menerima, akhirnya perahu dipinjamkan kepada salah satu warga Desa Tuapejat untuk digunakan mencari ikan.

Diakui oleh pihak PIU bahwa kondisi perahu tersebut memang masih ada kekurangan, tetapi tidak terlalu signifikan, terbukti masih bisa digunakan untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan. Dengan berakhirnya kepengurusan LPSTK yang lama tahun 2007, maka perahu tersebut kemudian diserahkan kepada LPSTK yang baru, tetapi LPSTK yang baru tidak mau menerima, karena kondisi perahu sudah dalam keadaan rusak, deknya sudah pada bocor-bocor, dindingnya sudah pecah-pecah, dan mesin dalam keadaan rusak berat. Mesinnya pun sudah berganti Dongfeng 23 PK. Begitupun dengan keadaan perlengkapan melautnya sudah tidak ada semua. Saat mau diserahkan, perahu dalam keadaan karam terdampar di tepi pantai Pelabuhan Tuapejat, tanpa mesin dijepit oleh perahu-perahu lain yang sedang berlabuh.

Kendatipun secara resmi perahu belum diterima LPSTK yang baru, tetapi perahu sudah berada pada Sekretaris LPSTK. Perahu tersebut sudah diseret berada di tepi pantai, dan menurut informasi Ketua LPSTK perahu dalam keadaan sedang diperbaiki. Demikian juga mesinnya sedang dalam perbaikan pada seorang mekanik anak buah Pak Nardin yang tidak lain adalah pengurus Sekretaris LPSTK sendiri. Dana perbaikan selama ini sudah menelan anggaran 4 juta rupiah. Dana perbaikan tersebut masih tersisa 7 juta rupiah, tersimpan di tempat Pak Nardin. Uang tersebut berasal dari anggaran dana perbaikan tahun 2007 sebesar 11 juta rupiah.

Kalaulah misalnya perahu Pokmaswas dalam kondisi laik jalan pun, sesungguhnya tidak ada jaminan kegiatan pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan di laut bisa dilakukan, karena tidak ada aturan yang jelas menyangkut kewenangan masyarakat. Contoh kalau ada ditemukan orang menambang pasir, melakukan pemotasan, pemboman, pengambilan terumbu karang, dan tindak pencurian, timbul pertanyaan seberapa jauh masyarakat bisa

bertindak. Apakah boleh menangkap, menyimpan barang bukti, atau hanya sekedar melaporkan kepada aparat penegak hukum. Lalu aparat penegak hukum mana yang terbuka menerima laporan pengaduan masyarakat. Sementara itu telah diketahui bahwa diantara jajaran aparat penegak hukum sendiri seperti Polairud, Kamla, instansi terkait seperti DKP, Dinas Perhubungan Laut, tampaknya belum terbangun koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan hukum terhadap setiap bentuk tindak pelanggaran dan kejahatan di laut.

Lebih menyedihkan lagi pejabat PPNS DKP dan Kapal Patroli pengaman laut tidak dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. tampaknya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, terjadinya tindak kekerasan berupa pembakaran kapal-kapal pukat harimau oleh masyarakat setempat yang diduga sebagai sumber terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang adalah akibat mandegnya tindakan penegakkan hukum oleh aparat pemerintah.

Ketidakjelasan kewenangan masyarakat bisa berakibat fatal bagi masyarakat untuk bertindak. Salah-salah malah dituduh balik main hakim sendiri. Kendatipun demikian, secara hukum sudah ada langkah maju dalam upaya pelarangan eksploitasi sumberdaya laut yang bersifat destruktif melalui Perda Kabupaten, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai, dan Peraturan Desa, namun masih diperlukan penegasan kewenangan masyarakat serta pembinaan hukum yang memadai bagi para petugas Pokmaswas.

### **Kegiatan Konservasi**

Program kegiatan konservasi dilakukan dengan pembentukan lokasi DPL. Kegiatan ini sudah dilakukan pada tahun 2006. Lokasinya di Resort Aloita, tepatnya persis di depan perairan Dusun Jati, berupa pantai pasir putih dan Tanjung di sebelah Utara P. Hawera. Luas arealnya meliputi 51,30 ha. Jarak tempuh dari Dusun Jati sekitar 15 menit, ditempuh dengan perahu robin. Tidak ada hal yang

membedakan lokasi DPL dengan lokasi lain, karena memang tidak ada tanda-tanda batasnya sebagai lokasi konservasi. Lokasi ini dipilih karena kondisi terumbu karangnya masih bagus. Pemilihan lokasi ini dilakukan oleh tenaga ahli dari Universitas Riau, setelah melakukan observasi di beberapa wilayah perairan Desa Tuapejat.

Pembuatan tanda-tanda DPL dikontrakkan oleh PIU kepada pihak ke tiga. Hingga kini sudah dua kali dilakukan kontrak pembuatan DPL, yakni tahun 2006 dan tahun 2008. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan ini hanya sekedar menjadi tenaga upahan. Lokasi tersebut, sebenarnya menjadi lintasan ke luar masuk perahu masyarakat menuju kebunnya. Karena itu dengan dibuatnya tanda-tanda DPL telah dirasakan sebagai penghambat jalur transportasi. Lokasi ini juga berbatasan langsung dengan kebun-kebun milik penduduk. Tidak lama setelah dibangun DPL 2006, semua tanda-tanda DPL berupa tali pelampung, tali tanda bendera, dan jangkar, hilang tidak diketahui rimbanya. Tahun 2008 dibuat kembali tanda-tanda DPL, tetapi sekali lagi menghadapi nasib yang sama. Dengan kejadian tahun sebelumnya. Upaya untuk mencari lokasi pengganti sudah dijajaki seperti di lokasi perairan di sekitar Dusun Pukarayat, perairan P. Pitojat, tetapi lokasi-lokasi tersebut merupakan konsentrasi kegiatan penangkapan ikan masyarakat (fishing spot).

Kondisi terumbu karang setelah dijadikan sebagai lokasi DPL terkesan simpang siur. Renold salah seorang Staf DKP saat melakukan penyelaman saat pemasangan patok-patok DPL 2008 mengatakan bahwa kondisi terumbu karang sudah mulai tumbuh. Zulfikar salah seorang staf DKP yang sekaligus sebagai Ketua CRITIC yang sedang melakukan penelitian untuk S2-nya, di lokasi DPL kondisi terumbu karang sudah banyak yang rusak. Ketua LPSTK sendiri menyatakan bahwa di lokasi DPL aktivitas penyelaman dengan menggunakan kompresor untuk menangkap ikan kerapu, lobster, dan ikan hias. Di duga aktivitas penangkapan tersebut menggunakan racun potasium. Pelakunya orang setempat Desa Tuapejat. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2007. Kepada pelaku tersebut pernah diperingatkan oleh LPSTK

agar tidak melakukan aktivitas penangkapan di lokasi DPL agar kondisi terumbu karang dapat pulih kembali secara alami. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan masih adanya praktik eksploitasi sumberdaya laut dengan menggunakan potasium, walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Tampaknya penempatan lokasi DPL memang perlu dikaji kembali, dengan mengedepankan pendekatan sosial budaya. Hal ini penting mengingat ada indikasi kuatnya sistem kepemilikan hak ulayat laut masyarakat setempat. Persoalan menyangkut hak ulayat laut juga dihadapi oleh Pokmas “Mandiri Baru” yang bergerak dibidang usaha budidaya rumput laut.

### **Program Pengadaan Prasarana Sosial (*Village Grant*) dan Pondok Informasi**

Program kegiatan pengadaan prasarana sosial meliputi kegiatan pembuatan Pondok Informasi, pembuatan tambatan perahu, dan sarana sanitasi lingkungan berupa tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) umum. Bangunan prasarana sosial desa tersebut dibangun pada tahun 2007.

Bangunan Pondok Informasi berupa rumah panggung berukuran antara 9 x 8 m. Tata ruangnya pada bagian depan terdapat bangunan teras seluas 2 x 4 m, berdinding papan dan beratap seng. Ruang tengah Pondok Informasi berupa ruang los tanpa kamar. Pada sudut-sudut ruangan menggonggok kasur, sepatu, dan senjata yang berserakan di lantai. Pada dinding-dinding bangunan digantungkan pakaian seragam doreng marinir. Di halaman depan, tidak ada papan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan Pondok Informasi milik LPSTK Desa Tuepejat. Bangunan ini menempati sebidang tanah di pesisir pantai Mapadegat.

Atas permintaan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, bangunan tersebut dipinjamkan kepada TNI AL untuk dipergunakan sebagai Pos AL. Dalam kontrak pinjam pakai antara pihak TNI AL dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai,



tercantum kesepakatan bahwa pihak pemakai bersedia mengembalikan tempat tersebut apabila pihak DKP sewaktu-waktu memerlukannya. Pertimbangan Bupati untuk memanfaatkan bangunan ini adalah dari pada tidak dimanfaatkan, lebih baik ditempatkan Pos AL, yang harapannya sekaligus berfungsi untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir di pantai Mapadegat. Kendatipun fungsi pengawasan ini belum optimal, tetapi dampaknya sudah dirasakan oleh para penambang pasir, paling tidak akan timbul perasaan segan melakukannya.

Bangunan ini berjarak sekitar 4 km dari Desa Tuapejat tempat pengurus LPSTK bermukim. Karena letaknya yang jauh, dan cukup melelahkan bila ditempuh dengan jalan kaki, serta tiadanya sarana angkutan umum untuk menuju ke sana, maka praktis bangunan Pondok Informasi tidak dimanfaatkan oleh LPSTK. Kantor sekretariat LPSTK sendiri menempati ruang kecil berukuran 2m x 3m di Kantor Desa Tuapejat. Ruangan ini hanya diisi dengan kertas-kertas bekas, rongsokan kursi, meja, lemari dan papan bekas yang letaknya berserakan.

Ketua LPSTK sendiri menempati ruang kantor sekretaris desa, yang merangkap sebagai Sekretaris Desa. Jabatan rangkap yang dipegangnya, serta letak kantor Pondok Informasi yang jauh membuat tidak optimalnya kinerja jajaran pengurus LPSTK. Bangunan fisik lain berupa tempat tambat perahu yang dibangun di pesisir pantai Dusun Pukarayat. Bangunan tersebut kini sudah tidak tampak lagi bekasnya, karena sudah lapuk dan hancur dihempas gelombang. Bangunan MCK, terdiri dari 4 pintu, yang ditempatkan di belakang Kantor Desa, 1 pintu MCK sudah dimanfaatkan, dan 3 pintu belum dimanfaatkan karena dasar bak dan lantainya pecah-pecah, serta kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih merupakan satu faktor penting kurang terjaganya kebersihan MCK tersebut. Sementara itu letaknya yang berada di belakang kantor desa dan dikelilingi pagar, sehingga tidak dapat secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Bangunan prasarana sosial desa tersebut dikerjakan oleh kontraktor tanpa melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Pertimbangannya tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara gotong royong, ada pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian. Kecuali itu ada ketentuan administrasi, bila mencapai nilai tertentu (di atas 100 juta rupiah) sebuah proyek harus dilakukan melalui tender. Kendatpun demikian, tidak juga ada jaminan lebih berkualitas bila dikerjakan oleh kontraktor. Cara demikian, jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang lebih mengedepankan segi partisipasi aktif masyarakat, terciptanya peluang kerja, tergalinya swadaya masyarakat, serta menanamkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program-program kegiatan COREMAP II di Desa Tuapejat

### **2.3.1. Partisipasi dan Manfaat Kegiatan COREMAP**

Pembangunan fisik dari program kegiatan COREMAP II berupa, 1 unit bangunan Pondok Informasi, 1 unit bangunan tambat perahu, 4 pintu WC umum, dan pembuatan ulang patok dan tanda batas kawasan konservasi Daerah Perlindungan Laut (DPL). Bangunan Pondok Informasi berlokasi di Dusun Mapadegat, bangunan tambat perahu di Dusun Pukarayat, ke dua bangunan tersebut jauh letaknya dari Desa Tuapejat, sekitar 5 km perjalanan darat. Bangunan WC umum berada di belakang kantor Desa Tuapejat, sedang kawasan konservasi berada di tempat yang lama menempati perairan pantai sebelah Barat P. Aweru.

Semua bangunan fisik tersebut dibangun oleh kontraktor melalui proses tender, tanpa melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat tidak pernah diajak bicara menyangkut manfaatnya, letaknya, bagaimana konstruksinya, siapa yang harus melakukan pekerjaan ini, berapa dananya, dimana pengadaan barangnya, siapa dan bagaimana perawatannya. Semuanya sudah ditangani oleh kontraktor. Kalaulah ada sejumlah warga yang terlibat, keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi buruh pekerja kuli bangunan yang diupah.

Saat responden ditanya, apakah ada anggota rumah tangga yang terlibat dalam pekerjaan ini ? Dari sejumlah 128 responden yang

diwawancarai, hanya 2 orang atau sebesar 1,6 persen yang menjawab terlibat dalam pekerjaan tersebut, selebihnya sebanyak 126 responden atau sebesar 98,4 persen menjawab tidak terlibat. Kecilnya angka keterlibatan bias dimengerti mengingat bangunan fisik jauh letaknya dari Desa Tuapejat. Di Desa Tuapejat sendiri ada kegiatan pembangunan fisik berupa 4 pintu WC umum yang dibangun di belakang Kantor Desa Tuapejat. Orang mengira bahwa bangunan tersebut bukan dari bagian program kegiatan COREMAP., tetapi proyeknya milik Pemerintah Desa. Begitu pun yang terjadi dengan pemasangan patok DPL dan pemberian tanda batas perairan DPL. Masyarakat tidak terlibat, karena ditangani sendiri oleh team CRITIC dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keberadaan bangunan fisik tersebut juga dirasakan kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Bangunan WC umum 4 pintu, hanya 1 pintu yang dapat dimanfaatkan, 3 pintu yang lain tidak bias digunakan. Kondisi lantai bangunan pecah-pecah, dan bak kamar mandi pada bocor. Tidak tersedia instalasi air bersih, dan sumur galian yang ada di sekitarnya kering. Bangunan WC umum kurang terpelihara, tampak kotor, dan menebarkan aroma yang tidak sedap.

Bangunan Pondok Informasi tidak dimanfaatkan oleh pengurus LPSTK, karena domisili jajaran pengurus LPSTK ada di Dusun Tuapejat, sedangkan bangunan Pondok Informasi ada di Dusun Mapadegat sejauh 5 km dari Desa Tuapejat. Bangunan tersebut kini dimanfaatkan sebagai Pos Keamanan Angkatan Laut dengan status pinjam pakai. Kegiatan administrasi LPSTK masih dilakukan di Kantor Desa Tuapejat.

Bangunan tambat perahu di Dusun Pukarayat juga jauh dari aktivitas kegiatan nelayan. Menurut informasi masyarakat, bangunan tersebut dibuat dari bahan kayu berkualitas rendah dan dibangun asal jadi. Praktis sejak dibangun belum pernah dimanfaatkan, keburu hancur diterjang gelombang.

### 2.3.2. Permasalahan dan Kendala Kegiatan Fisik

Pengadaan bangunan fisik dihadapkan pada berbagai kendala. Pertama, menyangkut administrasi, ada suatu ketentuan bahwa bila nilai suatu kegiatan melebihi budget tertentu sebesar di atas 100 juta rupiah, maka kegiatan harus dilakukan melalui tender. Ke dua, program kegiatan bangunan fisik menuntut keahlian khusus menyangkut pembuatan gambar desain bangunan dan konstruksi bangunan. Karena itu, dituntut untuk dapat memenuhi syarat kualifikasi dan mampu menjelaskan spesifikasi bangunan. Ke tiga, menyangkut sulitnya mencari lahan untuk mendirikan tapak bangunan. Bangunan MCK misalnya, sulit mencari lahan untuk menempatkan bangunan itu. Sudah ditawarkan kepada masyarakat, tetapi tidak ada yang bersedia.

Masyarakat merasa keberatan karena akan menyita lahan, mengganggu privasinya, dan kebersihan lingkungan justru akan terganggu bila tidak terjaga kebersihannya, sebab kesulitan pengadaan air bersih akan menjadi kendala dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Contoh lain, tidak ada warga masyarakat Desa Tuapejat yang bersedia ketempatan bangunan Pondok Informasi. Penelitian tahun 2007 lalu, ada rencana bangunan Pondok Informasi akan dibangun bersebelahan dengan kantor Desa Tuapejat, tetapi pemilik tanah merasa keberatan. Pengurus LPSTK merasa kesulitan juga untuk mencari lokasi penggantinya, akhirnya bangunan Pondok Informasi di bangun di Dusun Mapadegat menempati sebuah lahan pekarangan penduduk, tetapi agak terpencil dari permukiman penduduk. Harapannya dengan dibangunnya pondok informasi di lokasi tersebut dapat dijadikan tempat untuk mengawasi aktivitas penambangan pasir di Pantai Mapadegat. Kenyataannya aktivitas penambangan masih tetap berlangsung. Sebagai akibatnya abrasi laut semakin dalam mengikis pantai pasir putih Teluk Mapadegat. Akibat lebih lanjut, menurunnya wisatawan di tempat tersebut, karena rusaknya obyek wisata pantai pasir putih Dusun Mapadegat.

Pernah suatu hari petugas motivator desa menegur para penambang pasir tersebut, dengan nada kasar mereka balik menuntut

“apakah kamu mau mengganti pendapatan saya sebesar Rp 300.000,- sehari”. Tanggapan seperti ini membuat petugas merasa sakit hati dibuatnya. Keberadaan bangunan Pos Keamanan Angkatan Laut, menurut pengakuan Nurhayati selaku petugas motivator desa tidak banyak mengubah keadaan.

Selain itu di Desa Tuapejat masih menghadapi masalah perahu Pokmaswas. Saat di cek di lokasi, kondisi perahu tampak belum diperbaiki secara menyeluruh. Tampak di sana-sini bodi perahu rusak, dinding samping berlubang, dan dek perahu sudah pada copot. Sementara menurut pengakuan mekaniknya sendiri, mesin dalam keadaan rusak berat, pistonnya macet, dan sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan. Disarankan lebih baik membeli mesin lagi yang baru, ketimbang harus memperbaiki mesin yang lama yang akan menelan biaya yang lebih besar.

Bangunan tambatan perahu yang berlokasi di Dusun Pukarayat jauh dari aktivitas kenelayan. Disamping itu kondisi fisik bangunan tambatan perahu tersebut kualitas konstruksinya dinilai kurang berkualitas, Informasi ini diperoleh dari Sekretaris LPSTK. Bangunan tersebut kini dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya bangunan MCK umum yang terletak di belakang Kantor Desa Tuapejat yang terdiri atas 4 pintu namun yang bisa dimanfaatkan hanya satu pintu, karena sisanya dalam keadaan rusak. Kondisi kebersihan MCK tersebut kendati masih baru, namun tidak terjaga kebersihannya. Sementara itu terkendala oleh ketidak-tersediaan air bersih, Pemanfaatan MCK tersebut yang tadinya diperuntukkan bagi masyarakat luas, namun dalam kenyataan hanya digunakan oleh pegawai kelurahan, tamu kelurahan dan tetangga sebelah.



### BAB III

## PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Penelitian benefit monitoring dan evaluasi tahun 2007 tentang pengaruh COREMAP terhadap pendapatan penduduk di Tuapejat menunjukkan antara tahun 2005-2007 terjadi peningkatan pendapatan penduduk sebesar 52,62 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih tinggi daripada laju inflasi di daerah yaitu 19,03 persen tahun 2005 dan 7,81 persen tahun 2006. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan ini lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi di luar COREMAP seperti perdagangan dan jasa. Berdasar informasi di lapangan, kegiatan COREMAP selama dua tahun tersebut belum memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat termasuk peningkatan pendapatan. Mata pencaharian alternative yang dibiayai COREMAP baru dilakukan dalam beberapa bulan sebelum dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga belum ada dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Hasil penelitian juga menemukan adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah, sehingga terdapat masalah pemerataan pendapatan penduduk.

Penelitian pada tahun 2009 dimaksudkan untuk melihat perkembangan lebih lanjut pengaruh program COREMAP terhadap pendapatan penduduk selama kurang lebih 4 tahun pelaksanaan program (2005-2009). Perubahan pendapatan penduduk dalam tulisan ini meliputi perubahan pendapatan penduduk dari semua sektor dan pendapatan khusus dari kegiatan kenelayanan. Perubahan pendapatan selama 4 tahun pelaksanaan program diharapkan dapat menjelaskan tingkat keberhasilan program karena ada sebagian besar program telah berjalan dan secara langsung dapat berdampak pada masyarakat baik dampak negatif maupun positif. Penghitungan pendapatan dalam

penelitian ini masih berdasarkan harga yang berlaku, sehingga penjelasan tentang perubahan pendapatan penduduk akan dihubungkan dengan laju inflasi, maupun tingkan upah di daerah setempat.

### 3.1. PENDAPATAN RUMAH TANGGA

Secara umum selama dua tahun terakhir (2007-2009) terjadi penurunan pendapatan perkapita di Tuapejat sebesar (-31,2 persen), sementara pendapatan rumah tangga menurun (-23,3 persen). Penurunan pendapatan ini masih belum memperhitungkan inflasi di daerah, sehingga penurunan pendapatan riil yang diterima masyarakat sebenarnya lebih rendah dari angka tersebut. Kesenjangan pendapatan antara pendapatan terendah dan tertinggi pada tahun 2009 ini juga sangat tinggi (25 ribu dibanding dengan 10 juta). Penurunan pendapatan ini bernanding terbalik dengan hasil penelitian monitoring dan evaluasi tahun 2007. Pada tahun tersebut, terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi di luar COREMAP seperti perdagangan dan jasa. Tahun 2007-2009 kegiatan-kegiatan tersebut tidak mengalami perkembangan sehingga berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan penduduk.

Begitu pula halnya dengan kegiatan ekonomi produktif yang dibiayai COREMAP. Semua kegiatan yang dimulai tahun 2007 sampai saat ini tidak ada yang berhasil. Kelompok masyarakat yang dibuat telah bubar, peminjam tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dan akhirnya pinjaman diputihkan. Untuk menjalankan program COREMAP II, masyarakat melakukan pergantian pengurus LPSTK. Namun sampai saat ini, program ekonomi produktif yang dijalankan juga belum terlihat ada yang berhasil. Dikhawatirkan sebagian besar usaha ekonomi tersebut akan mengalami nasib yang sama dengan program sebelumnya yaitu mengalami kegagalan dan akhirnya diputihkan. Gejala ke arah tersebut tampak jelas karena sebagian usaha yang diusulkan tidak didasarkan pada perhitungan yang matang, cenderung bersifat coba-coba.



Tabel 3.1  
Statistik Pendapatan Penduduk per Bulan  
di Desa Tuapejat, Mentawai tahun 2005, 2007 dan 2009

Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)			Perkembangan (%)	
	2005	2007	2009	2005- 2009	2007- 2009
Per kapita	243.877	372.194	256.013	4,98	-31,2
Rata-rata	1.113.596	1.376.970	1.056.308	-5,14	-23,3
Median	866.667	900.000	658.333	-24,04	-26,9
Minimum	87.500	12.500	25.000	-71,43	100,0
Maksimum	5.866.667	8.000.000	10.000.000	70,45	25,0

Sumber : Data Primer, Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2005,2007 dan 2009

Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk yang mempunyai pendapatan terendah (Rp 500 ribu). Meskipun demikian perubahan pendapatan penduduk tersebut tampaknya tidak besar karena sebagian besar bergeser pada tingkatan di atasnya (antara Rp 500 rb- 999 rb) yang masih termasuk dalam kelompok pendapatan rendah. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2005 dan 2006, dapat dikatakan tidak ada perubahan proporsi penduduk yang berpendapatan rendah. Fakta ini memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa perubahan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang berpendapatan tinggi, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan penduduk yang cukup tinggi. Proporsi rumah tangga yang berpendapatan rendah (< 1 juta) antara tahun 2005 dan 2007 hampir sama (55,8 persen dan 54,8 persen) yang menunjukkan tidak adanya penurunan proporsi rumah tangga yang mempunyai penghasilan rendah. Rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan ini berasal dari pekerja kasar/ tukang angkut barang di pelabuhan, nelayan tradisional, petani, dan pegawai honorer.

Tabel 3.2.  
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan	Persentase		
	Tahun 2005	Tahun 2007	Tahun 2009
< 500.000	33.7	25.3	52,8
500 rb - 999 rb	22.1	29.5	26,8
1.000.000 – 1.499.999	23.1	14.7	6,3
1.500.000 – 1.999.999	6.7	11.6	3,1
2.000.000 – 2.499.999	6.7	9.5	4,7
2.500.000 – 2.999.999	1.0	1.1	0,0
3.000.000 – 3.499.999	1.0	1.1	2,4
>/ 3.500.000	5.9	7.4	3,9

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, tahun 2005, 2007 dan 2009

Pada tahun 2009 persentase rumah tangga di Tuapejat yang mempunyai pendapatan rendah (< 0,5 juta per bulan), mengalami peningkatan dari 25,3 persen pada tahun 2007 menjadi 52,8 persen pada tahun 2009. Persentase rumah tangga pada kelompok pendapatan rendah yang lain (0,5 juta – 0,9 juta) tidak mengalami perubahan yang tinggi yaitu 29 persen pada tahun 2007 menjadi 27 persen pada tahun 2009. Tingginya persentase rumah tangga yang mempunyai penghasilan rendah ini menunjukkan menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Kelompok penduduk berpenghasilan rendah menjadi sulit meningkatkan pendapatannya, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Penduduk setempat umumnya merupakan penduduk berpendidikan rendah dengan sumber pendapatan yang tergantung pada alam. Beberapa program COREMAP ditujukan untuk usaha budidaya, tetapi program tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena pemerintah sendiri tidak menguasai usaha yang diajukan sementara kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha juga sangat lemah.

Rumah tangga yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi (> 3 juta) tidak mengalami perubahan yang mencolok. Pada tahun 2007 terdapat 8,5 persen rumah tangga berpenghasilan tinggi, sementara

pada tahun 2009 terdapat 6,3 persen rumah tangga yang masuk dalam kelompok penghasilan tinggi tersebut. Rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan ini sebagian berasal dari keluarga nelayan, dan yang lain berasal dari pedagang maupun jasa. Seorang nelayan mengaku dalam musim gelombang kuat dia hanya mendapatkan penghasilan perbulan sekitar 450 ribu rupiah, sedangkan pada waktu musim pancaroba dan gelombang lemah ia masing-masing mendapatkan 3,5 juta dan 16 juta per bulan. Pendapatan yang didapatkan nelayan ini cukup tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan dengan nelayan yang lain.

### 3.2. PENDAPATAN RUMAH TANGGA DARI KEGIATAN KENELAYANAN

Hasil penelitian benefit monitoring dan evaluasi tahun 2007 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari sektor kenelayanan dari 34 persen tahun 2005 menjadi 36 persen tahun 2007. Tahun 2009 jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari kegiatan kenelayanan kembali meningkat menjadi 57,8 persen. Proporsi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan rumah tangga juga meningkat dari 75 persen pada tahun 2007 menjadi 94,05 persen pada tahun 2009.

Beberapa kemungkinan yang membuat peningkatan proporsi tersebut adalah : (1) terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga di sektor kenelayanan sementara total pendapatan rumah tangga cenderung tetap atau menurun. Dalam kondisi demikian, peran kegiatan kenelayanan dalam rumah tangga menjadi semakin besar sebagai tumpuan ekonomi rumah tangga tetapi perekonomian rumah tangga tidak mengalami peningkatan. (2) pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan tetap, sementara total pendapatan rumah tangga mengalami penurunan. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi rumah tangga menjadi semakin rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (3) pendapatan dari kenelayanan maupun total pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan, tetapi laju peningkatan pendapatan dari kegiatan kenelayanan lebih besar dibandingkan dengan total

pendapatan. Dalam kondisi seperti ini, perekonomian rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. (4) pendapatan dari kegiatan kenelayanan dan total pendapatan rumah tangga mengalami penurunan, tetapi penurunan total pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan kegiatan kenelayanan. Dalam kaitan dengan rumah tangga di Tuapejat ini, peningkatan proporsi disebabkan semakin tingginya pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Rumah tangga banyak yang tergantung dari kegiatan melaut, sebab sebagian rumah tangga mempunyai proporsi pendapatan dari kegiatan kenelayanan mencapai 100 persen.

Tabel 3.3.  
Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa  
Tuapejat, Mentawai

Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)			Perkembangan (%)	
	Tahun 2005	Tahun 2007	Tahun 2009	2005- 2009	2007- 2009
Per Kapita	104.601	156.905	193.274	84,77	23,18
Rata-rata rumah tangga	536.326	610.017	761.074		
Median	310.333	654.125	561.666	41,91	24,76
Minimum	40.000	83.333	115.000	80,99	-14,13
Maksimum	3.885.000	1.558.333	6.650.000	187,50	38,00
				71,17	326,74

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005, 2007 dan 2009

Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan selama tahun 2007-2009 mengalami peningkatan sebesar 23,18 persen untuk pendapatan perkapita dan 24,8 persen untuk pendapatan rumah tangga. Persentase peningkatan pendapatan per kapita cukup tinggi sehingga lebih besar dari angka inflasi pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 20,35 persen. Akan tetapi pendapatan perkapita penduduk di daerah ini masih lebih kecil dari garis kemiskinan propinsi Sumatera Barat (217.649 rupiah), sehingga secara rata-rata penduduk masuk dalam kategori miskin. Oleh sebab itu, masih diperlukan upaya yang komprehensif dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah pengembangan mata pencaharian alternatif

di luar sektor perikanan. Selama ini sebagian besar usulan mata pencaharian alternatif masih terbatas pada sektor kelautan. Usulan tersebut terbukti gagal karena keterbatasan sumber daya manusia dari nelayan maupun pemerintah. Selain itu, mata pencaharian di luar sector kenelayanan selama ini cukup penting mengingat hampir 50 persen nelayan di Mentawai juga bekerja di sektor yang lain.

Perkembangan pendapatan dari kegiatan kenelayanan bervariasi menurut musim gelombang lemah, pancaroba, dan gelombang kuat (Tabel 4.6). Rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah menurun sekitar (1,3 persen). Penurunan pendapatan ini tampak begitu kecil, namun jika dikontrol dengan inflasi di daerah selama dua tahun terakhir penurunan pendapatan rumah tangga menjadi sangat tinggi. Musim gelombang lemah ditandai dengan kondisi ombak yang bersahabat, sehingga nelayan dapat melakukan pekerjaan dilaut dengan tenang. Hasil tangkapan pada musim ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan musim gelombang kuat maupun pancaroba. Data statistik menunjukkan pendapatan rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah sebesar 1,4 juta. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pendapatan rumah tangga pada musim gelombang kuat (246.400 rupiah) dan pada musim pancaroba (556.447 rupiah).

Tabel 3.4.  
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan  
Menurut Musim di Desa Tuapejat, Mentawai

Jenis Pendapatan	Tahun			Perkembangan (%)	
	2005	2007	2009	2005- 2009	2007- 2009
Gel lemah	1.199.319	1.154.000	1.483.618	-5,1	-1,3
Pancaroba	358.156	481.806	556.447	44,5	7,4
Gel Kuat	160.660	138.393	246.400	52,6	77,1

Sumber: Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2005, 2007 dan 2009

Pada musim pancaroba, rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat sekitar 7,4 persen menjadi 556.447 rupiah. Pendapatan pada waktu musim pancaroba sangat kecil sekitar separoh dari pendapatan pada waktu musim gelombang tenang. Pendapatan rumah tangga dan perkapita hanya separuh dari pendapatan pada waktu musim gelombang lemah. Musim ini juga ditandai dengan adanya rumah tangga yang mengalami kerugian karena hasil tangkapan mereka tidak dapat digunakan untuk menutup biaya operasional. Beberapa nelayan mengaku tetap melaut meskipun mereka merugi dengan harapan hasil tangkapan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika tetap mengalami kerugian, rumah tangga tersebut dapat menutup kebutuhan rumah tangga dari kegiatan ART lain di luar sektor perikanan, atau berhutang pada tetangga.

### 3.3. PENDAPATAN ANGGOTA POKMAS

Jumlah kelompok masyarakat di Tuapejat yang terbentuk dalam rangka kegiatan COREMAP ini cukup besar, sehingga cukup banyak masyarakat yang terdata sebagai anggota Pokmas. Pada tahun 2008 terdapat 24 kelompok usaha ekonomi produktif bentukan COREMAP dengan anggota lebih dari 100 penduduk, selain itu pada tahun 2006 juga telah terbentuk 6 kelompok masyarakat. Diantara anggota Pokmas tersebut, terdapat 29 orang anggota yang menjadi responden pada penelitian ini. Anggota Pokmas diharapkan dapat memperoleh manfaat program COREMAP melalui pengembangan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Dilihat dari kondisi ekonominya, anggota Pokmas berasal dari berbagai kelompok mulai dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya. Tabel 4.5 menunjukkan pendapatan perkapita dari anggota Pokmas sekitar 272.331 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai 1,01 juta rupiah. Dibandingkan dengan pendapatan seluruh penduduk, pendapatan perkapita anggota Pokmas hampir sama dengan pendapatan perkapita penduduk desa.

Tabel 3.5.  
Statistik Pendapatan Rumah Tangga Pokmas, tahun 2009

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Per kapita	272.331
2	Rata-rata rumah tangga	1.006.264
3	Median	633.333
4	Minimum rumah tangga	105.000
5	Maksimum rumah tangga	6.650.000

Sumber : Data Primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia tahun 2009

Tingkat pendapatan rumah tangga yang menjadi anggota Pokmas bervariasi dari terendah (105 ribu rupiah) sampai dengan tertinggi (6,65 juta rupiah). Variasi pendapatan ini menunjukkan adanya perpaduan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Meskipun demikian mayoritas anggota Pokmas berasal dari kalangan ekonomi lemah yang membutuhkan dukungan dana untuk peningkatan taraf hidup mereka. Hanya ada 1 orang anggota yang berasal dari kalangan ekonomi tinggi karena memiliki pendapatan di atas 3,5 juta, sementara sisanya mempunyai pendapatan 1,5 juta ke bawah. Usaha ekonomi produktif yang diusahakan bervariasi mulai dari perdagangan, keramba jaring apung, pengolahan ikan asin, dan pembelian mesin perahu. Semangat yang tinggi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup menjadi modal utama mereka membentuk Pokmas. Namun demikian sampai saat ini sebagian besar usaha belum ada yang berhasil. Hanya ada dua Pokmas yang bisa mengembalikan pinjaman selama dua bulan pertama, sementara usaha lainnya belum dapat mengembalikan.

Tabel 3.6.  
Distribusi Rumah Tangga Pokmas Menurut Kelompok Pendapatan  
di Desa Tuapejat, Tahun 2009

No	Kelompok pendapatan	Frekuensi	Persentase
1	<500.000	13	44,8
2	500.000-1 Juta	10	34,5
3	1 Juta-1,5 Juta	4	13,8
4	1.5 Juta-2 Juta	1	3,4
5	>3.5 Juta	1	3,4
Total		29	100,0

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009

Proporsi anggota Pokmas yang mempunyai pendapatan di bawah 1 juta rupiah sebanyak 79,2 persen, dan yang mempunyai pendapatan di atas 1,5 juta rupiah sebesar 6,8 persen. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar anggota Pokmas berasal dari kelompok berpendapatan rendah. Pembinaan untuk kelompok masyarakat ini lebih memerlukan kesabaran dan ketekunan karena selama ini mereka mempunyai sumber mata pencaharian yang tergantung pada alam. Perubahan pola mata pencaharian dari tergantung pada alam menjadi budidaya maupun perdagangan tidaklah mudah. Antar anggota kelompok diharapkan dapat saling membantu dan bekerjasama untuk meningkatkan usaha.

### 3.4. CAPAIAN EKONOMI COREMAP

Program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang secara ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian penduduk. Secara eksplisit disebutkan salah satu indikator COREMAP adalah pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009). Indikator lain adalah paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.



Dampak ekonomi COREMAP pada penduduk dapat diketahui melalui perbandingan pendapatan penduduk sebelum dan sesudah dilaksanakan program maupun menanyakan secara langsung kondisi perekonomian yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

Perbandingan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP menunjukkan selama empat tahun terakhir (2005-2009) terjadi pertumbuhan negatif pendapatan rumah tangga di Tuapejat sebesar (-2,99 persen)\* per tahun sementara pendapatan perkapita tumbuh sebesar 2,8 persen/tahun. Penurunan pendapatan ini belum memperhatikan kondisi inflasi di daerah setempat sehingga penurunan akan lebih tinggi jika memperhitungkan laju inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program COREMAP belum dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dana COREMAP yang sudah dicairkan di masyarakat pada tahun 2006 dan 2008 diharapkan dapat terdistribusi di masyarakat sehingga perputaran uang di daerah dapat lebih tinggi. Selain itu, usaha ekonomi produktif yang dikembangkan oleh COREMAP melalui Pokmas diharapkan dapat menghidupkan roda perekonomian di daerah melalui usaha-usaha yang produktif. Tetapi sampai saat ini belum ada usaha ekonomi produktif dari COREMAP yang berkembang dan memberikan alternatif pekerjaan yang produktif bagi masyarakat.

Secara umum perubahan pendapatan rumah tangga dan perkapita dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, faktor internal rumah tangga (sumber pendapatan, teknologi alat tangkap/ produksi dan wilayah tangkap, biaya produksi dan kualitas SDM) dan faktor eksternal. Program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten dan pusat di Sikakap dan Tuapejat banyak yang memiliki kesamaan. Tuapejat merupakan desa yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, sehingga mempunyai kelebihan dalam

---

\* angka pertumbuhan ini dihitung berdasar rumus pertumbuhan geometri yaitu  $It = I_0 (1 + r)^t$ ,  $I_t$  adalah income pada tahun 2009,  $I_0$  adalah income pada tahun 2005,  $t$  adalah waktu (4 tahun), dan  $r$  adalah pertumbuhan.

pembangunan sarana dan prasarana. Sektor perdagangan, jasa dan hotel berkembang dengan pesat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Mobilitas penduduk dari dan ke Padang juga cukup tinggi, terutama pada waktu tanggal muda atau pegawai menerima gaji. Kebijakan yang dijalankan di Tuapejat yang secara langsung bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir diantaranya adalah COREMAP, PEMP, dan program lain yang dikoordinir oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

COREMAP di Tuapejat sampai saat ini telah memasuki tahun keempat, sehingga dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sudah dapat terlihat. Monitoring pada tahun 2007 menunjukkan bahwa program COREMAP belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, pencairan dana bergulir baru berjalan selama 2 bulan sehingga banyak peminjam yang belum mengembalikan pinjamannya. Pada tahun 2009, program-program yang didanai tahun 2007 ternyata sudah tidak berjalan lagi atau terhenti, sehingga kredit bergulir macet. Pengurus setempat mengambil inisiatif untuk memutihkan kewajiban pengembalian dana kepada anggota kelompok. Selanjutnya terjadi pergantian pengurus LPSTK untuk memperbaiki pengelolaan program.

Tahun 2009, LPSTK kembali memberikan pinjaman dana kepada 9 kelompok yang memiliki usaha berbeda yaitu keramba jaring apung, pengolahan ikan asin, rumput laut dan penangkapan ikan. Dana pinjaman terbesar diberikan pada kelompok keramba jaring apung meskipun sampai saat ini belum dapat menjalankan usahanya. Sampai saat ini ada dua kelompok yang dapat mengangsur pinjaman sementara 7 kelompok yang lain belum dapat melakukannya. Usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat secara umum tidak melalui perhitungan yang matang sehingga kemungkinan terjadi kredit macet sangat besar. Sebagian kelompok menyesuaikan diri dengan pengalihan usaha ke perdagangan sehingga mereka dapat bertahan. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat belum merasakan dampak positif yang ditimbulkan oleh program COREMAP. Hal ini dapat dilihat dari

distribusi jawaban responden pada waktu ditanyakan bagaimana keadaan ekonomi keluarga mereka sekarang dibandingkan dengan sebelum adanya program COREMAP yaitu 14,3 persen menyatakan lebih baik, 77,3 persen sama saja dan 8,4 persen lebih buruk.

Program pembangunan selain COREMAP juga ada yang dijalankan di Tuapejat meskipun tidak dijalankan secara baik. Budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha yang didanai oleh PEMP dan sampai saat ini masih berjalan. Program ini cukup memberikan optimisme yang tinggi kepada pengelola untuk meningkatkan usahanya. Program-program pembangunan fisik juga banyak dijalankan di Tuapejat, sehingga secara umum perkembangan ekonominya lebih baik dibandingkan dengan desa lain di Mentawai.

Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah sumber mata pencaharian, teknologi dan wilayah penangkapan, serta sumber daya manusia. Sebagian besar rumah tangga hanya memiliki satu sumber mata pencaharian sehingga pendapatannya relatif lebih rendah. Peran sektor perikanan terhadap perekonomian rumah tangga dapat dilihat dari proporsi pendapatan penduduk dari perikanan terhadap keseluruhan pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan proporsi pendapatan dari kegiatan kenelayan terhadap total pendapatan meningkat 75 persen pada tahun 2007 menjadi 94,05 persen pada tahun 2009. Rumah tangga yang hanya memiliki satu sumber pendapatan (perikanan) di Tuapejat tahun 2009 sebanyak 50 persen dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan sektor perikanan mempunyai peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini memberikan penjelasan bahwa usaha ekonomi alternatif yang selama ini dijalankan di Tuapejat belum dapat berjalan sesuai harapan.

Berkaitan dengan teknologi alat tangkap dan wilayah penangkapan, selama dua tahun terakhir terdapat perkembangan positif teknologi yang digunakan oleh nelayan untuk penangkapan ikan di laut. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan perahu motor dalam maupun luar. Pada tahun 2009 terdapat 11,7 persen responden yang mempunyai

perahu motor dalam, dan 38,3 persen responden yang mempunyai perahu motor tempel. Proporsi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan kepemilikan alat tangkap tahun 2007 yaitu 1 persen untuk mesin dalam dan 27 persen untuk mesin tempel. Perubahan kepemilikan alat tangkap ini kemingkunan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dari sektor kenelayanan. Meskipun demikian, pada waktu ditanyakan sejak ada COREMAP di daerah ini tahun 2005, apakah armada tangkap yang dimiliki mengalami perubahan, ternyata terdapat variasi jawaban responden. Sebanyak 4,7 persen menyatakan ukuran body/perahu bertambah besar, 1,6 persen menyatakan kapasitas mesin meningkat, 5,5 persen menyatakan body perahu bertambah besar, 0,8 jumlah armada bertambah dan 46,9 persen menyatakan tidak mengalami perubahan. Data ini memberikan penekanan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak mengalami perubahan kepemilikan alat tangkap.

Kondisi sumber daya manusia di Tuapejat pada saat ini juga tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selama ini terdapat berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia di perdesaan, namun pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara cepat. Pelatihan budidaya ikan kerapu hanya dilakukan selama 1 minggu, sehingga peserta belum dapat melakukan budidaya sendiri. Meskipun demikian ada sebagian warga yang ingin membuat keramba jaring apung untuk budidaya kerapu. Pengetahuan dan alat tangkap berpengaruh terhadap hasil tangkapan dilaut. Pada waktu ditanyakan sejak ada COREMAP di daerah ini (tahun 2005), secara umum bagaimana jumlah hasil tangkap dalam sekali melaut terdapat variasi jawaban responden. Sekitar 2,3 persen menjawab mengalami peningkatan, 2,3 persen mengalami penurunan, dan 54,7 persen tidak mengalami perubahan.

Perubahan pendapatan juga berkaitan dengan factor eksternal seperti pemasaran (harga dan akses), persaingan dengan nelayan luar, permintaan terhadap hasil tangkapan/produksi, iklim dan degradasi sumber daya pesisir. Musim/iklim merupakan factor alam yang tidak

dapat diprediksi dan dikendalikan. Meskipun demikian nelayan tetap membagi iklim ke dalam tiga jenis gelombang yaitu gelombang kuat, gelombang lemah dan musim pancaroba. Perubahan iklim berdampak pada volume dan produksi ikan di laut sehingga berdampak langsung pada tingkat pendapatan nelayan. Musim gelombang kuat merupakan musim yang kurang bersahabat bagi nelayan karena banyak nelayan yang tidak dapat melaut sehingga tidak mendapatkan ikan. Pekerjaan alternatif diperlukan terutama untuk memberikan pekerjaan pada waktu musim gelombang kuat. Data hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi antara pendapatan dari sektor perikanan menurut musim gelombang tenang, kuat dan pancaroba.

Sama halnya dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2007, harga dan akses pasar ikan di Tuapejat selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nelayan setempat biasa menjual hasil tangkapan berupa ikan segar di pasar lokal atau penampung tingkat desa yang berjajar di jalanan dekat laut. Jika tidak laku, hasil tangkapan dapat dibuat sebagai ikan asin. Nelayan setempat meyakini bahwa kualitas ikan asin yang mereka hasilkan lebih baik dari ikan asin yang dibuat di luar daerah. Oleh sebab itu harga jual di tingkat konsumen juga lebih mahal. Sebagian nelayan juga menjual ikan pada penampung tingkat desa yang kemudian di jual ke luar daerah seperti Padang. Pedagang lokal sudah punya jaringan pemasaran ikan yang dihasilkan di desa setempat. Peningkatan harga jual ikan di tingkat nelayan lebih menyesuaikan laju inflasi setempat sehingga jika dikontrol dengan laju inflasi harga ikan tersebut relative sama.

Degradasi sumber daya pesisir dan laut sampai saat ini masih menjadi factor eksternal yang cukup dirasakan oleh nelayan di Tuapejat. Beberapa tahun yang lalu jumlah ikan di perairan sekitar Tuapejat masih cukup banyak, tetapi saat ini terjadi penurunan yang signifikan. Pengambilan bakau, serta pendirian gedung-gedung baru di pinggir pantai merupakan salah satu hal yang perlu diatur sehingga tidak merusak ekosistem laut. Praktek pengambilan karang dan pasir di laut yang selama ini dilakukan oleh sebagian warga menjadi factor utama

terjadinya degradasi sumber daya pesisir dan laut. Penggunaan bom oleh nelayan dari luar maupun potassium yang dilakukan oleh nelayan local juga menjadi pemicu utama perusakan terumbu karang. Daerah perlindungan laut yang telah dibuat oleh COREMAP tidak dapat berjalan karena banyak dirusak oleh warga yang tidak setuju dengan pembangunan DPL. Degradasi laut yang cukup dirasakan oleh warga adalah rusaknya pasir putih di Mapadegat yang sebelumnya banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal terutama pada hari libur. Dengan kondisi tersebut, kepala dusun dan warga berinisiatif untuk melarang penambangan pasir guna menyelamatkan areal dekat mereka. Hal positif yang perlu diakui adalah terjadi penurunan penambangan pasir dan batu karang di Tuapejat karena adanya larangan pengambilan karang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Capaian ekonomi COREMAP juga dapat dilihat dari pertanyaan yang ditujukan langsung kepada responden tentang bagaimana keadaan ekonomi keluarga bapak, sekarang jika dibandingkan dengan sebelum adanya program COREMAP di desa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14,3 persen menyatakan pendapatan mereka lebih baik dibandingkan dengan sebelum ada COREMAP, 77,3 persen mengaku sama saja dan 8,4 persen menyatakan lebih buruk. Jika dibandingkan dengan tujuan COREMAP yang kedua agar 70 persen masyarakat di lokasi program merasakan dampak positif (pendapatan lebih baik) dari program, maka tujuan tersebut belum dapat tercapai. Hal ini disebabkan hanya 14,3 persen dari responden yang merasakan bahwa pendapatan mereka lebih baik dibandingkan dengan pendapatan sebelum ada program COREMAP. Meskipun hanya sedikit masyarakat yang merasakan dampak positif COREMAP terhadap pendapatan, tetapi pada saat ditanya apakah kegiatan ekonomi COREMAP perlu dilanjutkan sebagian besar (59,7 persen) menjawab perlu. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat secara umum masih berharap pada program yang dijalankan oleh COREMAP untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tabel 3.7.  
Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden Saat Ini  
Dibanding Sebelum Ada COREMAP

No	Kondisi ekonomi	Frekuensi	Persentase
1	Lebih baik	17	14,3
2	Sama saja	92	77,3
3	Lebih buruk	10	8,4
Total		119	100,0

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009

Pemanfaat langsung kegiatan COREMAP terjadi pada anggota kelompok masyarakat yang mendapatkan dana bergulir untuk pengembangan maupun pembentukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2007 terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mendirikan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif tersebut berupa pengolahan ikan, kepiting bakau, penangkapan ikan dan tani nilam. Setelah empat tahun berjalan anggota Pokmas belum dapat merasakan dampak positif dari kegiatan karena semua kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini usaha telah mati, anggota tidak dapat membayar angsuran, dan akhirnya diputihkan. Kegagalan ini disebabkan minimnya perencanaan usaha, keterbatasan sumber daya dan dinamika dalam kelompok sendiri. Usaha ekonomi produktif sebenarnya diusulkan sendiri oleh warga, tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasi kemampuan dan kelemahan sendiri. Usulan usaha hanya bersifat coba-coba tanpa diimbangi dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh sebab itu semua kegiatan tidak dapat memberikan dampak positif bagi anggota Pokmas maupun masyarakat di luar anggota Pokmas.

Kegagalan pengelolaan pada kegiatan COREMAP tahap I menjadi pelajaran bagi pengurus LPSTK untuk mensukseskan kegiatan COREMAP tahap II. Pada tahap kedua ini dibentuk 9 kelompok dengan berbagai jenis usaha yaitu keramba jaring apung (1 kelompok), pengolahan ikan

(5 kelompok), rumput laut (1 kelompok), penangkapan ikan (2 kelompok). Usaha keramba jaring apung sampai saat ini belum dapat berjalan karena berbagai kendala baik material, teknis, maupun pengetahuan. Secara material masih banyak bahan dan materi yang belum tersedia karena kekurangan modal dan sulitnya mencari bahan dasar. Secara teknis, pelaksana kegiatan belum menguasai betul pembuatan keramba jaring apung sehingga pembuatan KJA masih dilakukan sambil belajar. Pengetahuan yang didapat hanya berasal dari pelatihan selama 1 minggu dan dirasakan masih belum cukup. Usaha penangkapan ikan diberikan pinjaman untuk pembelian mesin kapal. Peserta usaha penangkapan ikan ini merasakan betul manfaat yang didapat dari pinjaman. Meskipun demikian, belum semua anggota mendapatkan mesin karena keterbatasan jumlah dana yang tersedia. Usaha pengolahan ikan mengalami kesulitan dalam ketersediaan bahan baku, selain harganya mahal ketersediaan bahan juga susah didapat. Nelayan lebih senang menjual ikan segar karena lebih mahal. Beberapa kelompok pengolahan ikan beralih usaha ke bidang perdagangan guna mengatasi kesulitan bahan baku tersebut. Usaha rumput laut belum dapat berjalan dengan baik karena sampai saat ini belum dapat panen.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. KESIMPULAN

Penelitian BME ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif tentang program COREMAP yang telah dilakukan di Desa Tuapejat pada kurun waktu pertengahan tahun 2005, 2007 sampai Mei 2009. Dengan adanya hasil penelitian empirik ini telah menjadi bahan monitoring dan evaluasi tentang jalannya program tersebut, sehingga merupakan masukan konsep substansi yang perlu diperhatikan secara serius untuk memperbaiki kinerja yang diharapkan akan menimbulkan dampak positif sampai berakhirnya program pada tahun anggaran 2009.

Program COREMAP telah dirancang dengan pendekatan secara *top down* dan mewadahi keinginan masyarakat, sesuai dengan RPTK yang telah dibuat. Dalam kenyataan mereka bekerja tanpa RPTK bahkan dokumen tidak diperoleh di desa. Namun demikian dalam kenyataan baik dalam kegiatan administratif keuangan maupun dalam penentuan isu kegiatan Pokmas ditentukan dari atas dan sedikit melibatkan masyarakat. Pendekatan yang cenderung *top down* tersebut tentunya memerlukan persyaratan yang matang dalam proses pengelolaan karena masyarakat telah dianggap sebagai obyek sehingga telah mengabaikan aspek partisipasi masyarakat (*bottom up*). Dalam kenyataan proses pengelolaan yang datang dari atas yaitu pada tataran kabupaten masih menunjukkan berbagai kelemahan. Beberapa aspek yang masih dirasakan antara lain :

### (1) Keterbatasan Jumlah SDM yang Handal.

Pada tataran kabupaten, kegiatan COREMAP masih mengalami kendala karena keterbatasan jumlah dan kualitas SDM. Karena keterbatasan tersebut maka topik isu kegiatan CBM dan studi kelayakannya tidak diadakan penelitian lebih dahulu. Manakala diadakan penelitian akan ada justifikasi ilmiah yang dapat meyakinkan bahwa kegiatan budidaya rumput laut, kegiatan keramba jaring apung, kegiatan pengolahan hasil laut, dan sebagainya bukan saja penting tetapi layak untuk dilakukan di Tuapejat. Oleh karena itu pada saat proses kegiatan Pokmas belum lama berjalan telah mengalami banyak kelemahan. Penentuan jenis kegiatan *village grant* juga tidak diadakan kajian lebih dahulu, tetapi telah menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana program. Bahkan proposal yang masuk ke DKP seharusnya juga dikaji secara matang oleh tim CRITC dengan memperhatikan kelayakan administratif, kemampuan SDM, kelayakan lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelayakan teknologi yang digunakan. Akibat proses tersebut tidak dilakukan secara serius maka kegiatan Pokmas UEP banyak yang mengalami kesulitan dalam mengimplimentasikan sesuai proposal. Sebagai contoh, usaha pengolahan hasil laut dalam hal ini ikan segar untuk jadi ikan asin, ternyata secara ekonomis tidak layak, meskipun daerah tersebut banyak hasil tangkapan. Nelayan lebih untung menjual ikan segar karena memperoleh harga yang relatif tinggi. Akibatnya kegiatan Pokmas tersebut kesulitan memperoleh ikan dengan harga rendah, maka kegiatan pengeringan ikan tidak menjadi kegiatan utama bahkan sering dihentikan dan kegiatan telah dialihkan untuk buka warung kelontong, jualan makanan, dan untuk usaha penangkapan ikan. Hal ini telah menyimpang dari dokumen proposal, meskipun kegiatan Pokmas tetap berjalan.

**(2) Keterbatasan jumlah SDM ahli di DKP untuk melakukan pendampingan.**

Karena di DKP tidak tersedia tenaga ahli sesuai dengan topik yang digarap oleh Pokmas maka tugas ini lebih dibebankan kepada Fasilitator dari Yayasan Karekat yang juga mempunyai keterbatasan kemampuan teknis untuk mengatasi substansi tiap Pokmas. Hal ini telah menyulitkan Pokmas pada saat terjadi kesulitan teknis karena tidak ada pendampingan yang mumpuni. Dalam kenyataan setelah dana digulirkan Pokmas dibiarkan berusaha sendiri sehingga ibarat anak ayam kehilangan induknya.

**(3) Pengurus LPSTK lama yang tidak profesional.**

Pada tataran desa, implementasi program COREMAP dilaksanakan oleh LPSTK dibantu oleh Fasilitator dan Motivator Desa. Pada kurun waktu 2005-2006 kegiatan lebih menekankan pada upaya sosialisasi program COREMAP (PA) untuk menyelamatkan terumbu karang. Hasil sosialisasi tersebut telah memberi pengetahuan yang luas pada masyarakat tentang manfaat terumbu karang dan larangan pengrusakan. Setelah itu program lebih ditekankan pada kegiatan CBM. Pada saat itu masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang topiknya ditentukan oleh Dinas DKP. Beberapa Pokmas berhasil memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sebagian lain mengalami kegagalan, misalnya Pokmas budidaya kepiting. Kegiatan Pokmas yang gagal telah diputihkan dan Pokmas yang berhasil mulai mengangsur dan diserahkan kepada LPSTK. Karena pengurus LPSTK yang lama tidak profesional maka telah muncul persoalan yang bersumber dari pengelolaan uang cicilan yang disetor tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya pengurus LPSTK diganti dengan pengurus baru yang kebetulan diketuai oleh Sekretaris Desa Tuapejat.

Adapun pada tataran desa beberapa kelemahan yang ada antara lain sebagai berikut :

#### **(4) LPSTK baru menghadapi kendala.**

Dalam aturan yang ada memang anggota LPSTK tidak memperoleh gaji atau honorarium. Meskipun demikian mereka dibolehkan untuk mengambil manfaat hanya dari dana potongan Pokmas sebesar 1,86 persen. Dalam tahun anggaran 2008 jumlah anggaran bagi 9 Pokmas sebesar Rp. 151.433.655. Dana tersebut baru dapat dicairkan pada bulan Maret 2009. Dalam kenyataan uang memasukkan hasil potongan secara keseluruhan masih kecil untuk dapat memberi imbalan yang layak secara reguler bagi anggota LPSTK. Meskipun demikian untuk operasional kegiatan LPSTK dapat diambil dari dana pendamping sebesar 47,5 juta rupiah. Dana tersebut juga tidak utuh karena pada tanggal 17 Maret 2009 sebagian dana yaitu 26 juta rupiah masih dipinjam oleh Kepala Dinas DKP untuk melaksanakan proyek percontohan budidaya kepiting bakau dan budidaya udang windu di pinggir teluk pada lokasi Km 2,5. Kendala lain yang dihadapi LPSTK antara lain tidak adanya ruang kerja LPSTK yang representatif, daerah kerja ada yang jauh, kesibukan tiap anggota LPSTK di luar kegiatan COREMAP, keterbatasan peralatan. Ruang kerja LPSTK masih bergabung dengan Kantor Desa Tuapejat. Dengan jumlah keterbatasan tersebut LPSTK masih mengalami kendala untuk secara aktif melayani 9 Pokmas UEP. Selain itu LPSTK juga belum berhasil mengembalikan kepercayaan dari Pokmas yang menunggak untuk bersedia melaksanakan kewajibannya. LPSTK hanya dapat menghimbau kepada Pokmas-Pokmas lama agar ada kesadaran melunasi dana bergulir yang masih menjadi tanggungan sesuai dengan kontrak yang pernah dibuat.

#### **(5) LPSTK Tidak Dapat Memanfaatkan Pondok Informasi**

Pondok informasi telah dibangun dengan harapan menjadi tempat aktifitas LPSTK. Dalam kenyataan kegiatan LPSTK berada jauh (4 Km) dari pondok informasi sehingga pondok tersebut tidak berfungsi seperti yang diinginkan. Karena pondok informasi berada di Mapadegat dalam keadaan kosong untuk sementara telah

dimanfaatkan oleh POSAL dengan status meminjam. Meskipun demikian keberadaan POSAL tersebut ternyata punya nilai positif yaitu dapat menekan penambang pasir laut yang telah mengakibatkan abrasi pantai.

#### **(6) Praktik Pemotasan Ikan dan Penebangan Mangrove Masih Berlangsung**

Praktik pengeboman ikan dan penambangan karang di Tuapejat telah tidak terdengar lagi, namun pemotasan ikan di karang hidup masih berjalan meskipun lokasinya mulai jauh dari Dusun Jati dan dilakukan secara sembunyi. Demikian pula penebangan mangrove masih terjadi meski dalam skala terbatas. Hal ini berarti bahwa Perda pelarangan untuk merusak terumbu karang dan mangrove telah berjalan walaupun belum optimal. Sementara itu Pokmaswas juga tidak berperan, antara lain tidak tersedia kapal yang layak berlayar dan belum ada kewenangan Pokmaswas untuk mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran.

#### **(7) DPL yang Tidak Berhasil**

Sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 DPL belum menunjukkan fungsinya. Pembuatan rumpon dan pembuatan rambu-rambu zonasi oleh fihak ketiga kendati telah dibuat dan telah diperbaiki tetap saja rambu-rambu tersebut hilang dirusak oleh orang tak dikenal. Saat ini DPL yang berada di barat daya P. Hawera tidak lagi terlihat pelampung, tali pembatas maupun jangkar. Berita yang muncul di masyarakat bahwa perusakan tersebut merupakan reaksi nelayan yang biasa memancing di daerah tersebut yang memang terumbu karangnya relatif masih baik. Ada pula yang mengatakan bahwa pemilik kebun di pulau merasa tidak dimintai izin sedangkan wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah adat mereka. Selain itu ada yang berpendapat lokasi DPL berada di jalur lalu-lintas laut sehingga keberadaan rambu-rambu dianggap menghambat mobilitas. Hal ini nampaknya masih menghadapi masalah komunikasi yang baik dengan stakeholders di daerah

tersebut sebelum penetapan lokasi DPL dan pembuatan rambu-rambu. Sementara itu Pokmaswas belum berfungsi untuk melakukan pengawasan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh staf peneliti LIPI tahun 2009, menunjukkan bahwa kondisi obyektif masyarakat di Tuapejat telah mengalami kemajuan disamping masih mengalami banyak kendala. Atas dasar uraian tentang indikator pemilikan asset rumah tangga, secara umum telah menunjukkan kemajuan. Pendapatan rumah tangga di Tuapejat selama empat tahun terakhir (2005-2009) mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-2,99 persen). Penurunan pendapatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2007-2009 yaitu (-31,2 persen) untuk pendapatan perkapita, sementara pendapatan rumah tangga menurun (-23,3 persen). Penurunan pendapatan ini masih belum memperhitungkan inflasi di daerah, sehingga penurunan pendapatan riil yang diterima masyarakat sebenarnya lebih rendah dari angka tersebut. Kesenjangan pendapatan antara pendapatan terendah dan tertinggi pada tahun 2009 ini juga sangat tinggi (25 ribu dibanding dengan 10 juta). Penurunan pendapatan ini bernanding terbalik dengan hasil penelitian monitoring dan evaluasi tahun 2007. Pada tahun tersebut, terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi di luar COREMAP seperti perdagangan dan jasa. Tahun 2007-2009 kegiatan-kegiatan tersebut tidak mengalami perkembangan sehingga berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan penduduk.

Begitu pula halnya dengan kegiatan ekonomi produktif yang dibiayai COREMAP. Semua kegiatan yang dimulai tahun 2007 sampai saat ini tidak ada yang berhasil. Kelompok masyarakat yang dibuat telah bubar, peminjam tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dan akhirnya pinjaman diputihkan. Untuk menjalankan program COREMAP II, masyarakat melakukan pergantian pengurus LPSTK. Namun sampai saat ini, program ekonomi produktif yang dijalankan juga belum terlihat ada yang berhasil. Dikhawatirkan sebagian besar usaha ekonomi tersebut akan mengalami nasib yang sama dengan program sebelumnya yaitu mengalami kegagalan dan akhirnya diputihkan. Gejala ke arah

tersebut tampak jelas karena sebagian usaha yang diusulkan tidak didasarkan pada perhitungan yang matang, cenderung bersifat coba-coba.

Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan selama tahun 2007-2009 mengalami peningkatan sebesar 23,18 persen untuk pendapatan perkapita dan 24,8 persen untuk pendapatan rumah tangga. Persentase peningkatan pendapatan per kapita cukup tinggi sehingga lebih besar dari angka inflasi pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 20,35 persen. Akan tetapi pendapatan perkapita penduduk di daerah ini masih lebih kecil dari garis kemiskinan propinsi Sumatera Barat (217.649 rupiah), sehingga secara rata-rata penduduk masuk dalam kategori miskin. Oleh sebab itu, masih diperlukan upaya yang komprehensif dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah pengembangan mata pencaharian alternatif di luar sektor perikanan sebab selama ini sebagian besar usulan mata pencaharian alternatif masih terbatas pada sektor kelautan.

## 5.2. REKOMENDASI

Bertolak dari tujuan dan hasil penelitian empirik, beberapa solusi yang dapat direkomendasikan antara lain sebagai berikut :

- (1) Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan program kegiatan COREMAP dengan mengedepankan azas partisipatif luas masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, memperoleh komitmen masyarakat, menggali swadaya masyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat, serta memperoleh dukungan masyarakat. Selama ini pelaksanaan COREMAP masih bias proyek yang bersifat "top down".
- (2) Dibutuhkan peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan COREMAP melalui peningkatan jumlah dan kualitas kemampuan SDM aparat pelaksana dan manajemen yang menekankan *good and clean*. Dengan kalimat sederhana bahwa pengelolaan kegiatan

COREMAP ditekankan pada rasa tanggung jawab yang lebih mengedepankan kepentingan pembangunan masyarakat luas untuk menyelamatkan terumbu karang daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

- (3) Dalam melakukan kegiatan COREMAP, segi pembelajaran melalui kegiatan Pokmas pilot proyek atau demonstrasi pilot yang terfokus, daripada harus mengejar target proyek yang terlalu banyak kegiatan sehingga tidak dapat dikontrol. Dengan kegiatan demplot ini, tekanan kegiatan lebih diprioritaskan pada peningkatan penguasaan keterampilan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan. Hal ini dimaksudkan agar mempercepat proses alih pengetahuan dan teknologi. Kelebihan dari kegiatan Pokmas skala prioritas ini adalah percepatan proses difusi atau penyebaran pembaharuan kepada masyarakat melalui proses imitasi (peniruan) atas keberhasilan kegiatan tersebut. Hal ini sekaligus akan memperbaiki citra kinerja aparat yang terlibat dalam kegiatan COREMAP karena kegiatan yang ada telah dipersiapkan secara matang. Kegiatan demplot juga akan memperkecil resiko kegagalan pada tahap implementasi di tingkat masyarakat. Contoh yang baik adalah pembuatan demplot budidaya kepiting dan udang windu yang dipimpin oleh Pak Sofyan dengan 3 orang tenaga pembantu yang telah berpengalaman. Bila proyek tersebut berhasil akan menjadi contoh buat usaha yang sejenis.
- (4) Perlunya penguatan kelembagaan dalam bentuk penyempurnaan Perda yang sudah ada sebagai pijakan hukum dalam kaitan upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul keraguan lagi baik dikalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menindak pelanggaran Perda. Dalam hal ini antara lain perlu dieksplisitkan pasal-pasal yang menyangkut sanksi pelanggaran kegiatan pengambilan terumbu karang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, pengeboman, dan penggunaan potassium/racun sianida. Penguatan kelembagaan juga menyangkut peningkatan



kemampuan managerial jajaran pengurus LPSTK, fasilitator desa, dan Pokmas. Hal ini penting, karena kegiatan COREMAP bertumpu pada kegiatan kelompok. Hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan berorganisasi serta keterampilan penguasaan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan masih memprihatinkan.

- (5) Sosialisasi program kegiatan COREMAP masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan institusi-institusi sosial yang ada serta berbagai media komunikasi setempat antara lain radio pemerintah daerah dan radio amatir. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan program-program sosialisasi yang selama ini telah dilakukan.
- (6) Mekanisme penyaluran dana perlu diubah dengan cara mengadopsi cara PNPM sebagai penyaluran pinjaman lunak kepada masyarakat kelompok binaan. Berbagai jenis kegiatan ekonomi produktif yang memang layak untuk didanai, perlu mendapat prioritas pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan masyarakat bahwa dana pinjaman merupakan pemberian gratis oleh negara, seperti program Raskin dan BLT. Dengan demikian masyarakat peminjam (creditor) akan mempunyai rasa tanggung jawab dan sekaligus akan meningkatkan tertib administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi, 2003, "Beyond Economy: Menyoal Masalah Identitas Pada Konflik-Konflik Kebudayaan", dalam *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No: 2, 2003. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004. *Analisis Pengembangan Profil Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005. *Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Bandiyono, Suko dan Antariksa IG. 2007. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Desa Tuapejat, Kabupaten Mentawai*. Jakarta: COREMAP-LIPI dan PPK-LIPI.
- CRITIC Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2006. "Laporan Sosial-Ekonomi Desa Tuapejat, Katurai dan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai". Mimeograph.
- Boyle, Patrick, 1981, *Planning Beter Program*, New York, McGrow Hill Book Company,
- Hardin, G. 1968 *The Tragedy of the Commons*, Science. 162 : 1243 — 1248.
- Nawawi & Ary Wahyono, 2007, *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, Desa Katurai, Kecamatan Siberut Selatan, Mentawai Sumatera Barat.*, Jakarta: PPK — LIPI.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, *Perubahan Rencana Stratejik Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejad*, Pemkab 26 Februari 2005,

Sudirman Saad, 2003. *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Dian Pratama Printing.

## SUMBER INFORMASI

Ketua-ketua dan anggota Pokmas UEP.

Ketua Pokmaswas

Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua LPSTK Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jajaran Pengurus LPSTK Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengurus Yayasan Kirakat

Fasilitator Desa, Fasilitator Teknis dan Motifator Desa.

